

ABSTRAK

W.E.Tinambunan, dkk
Dosen Fisipol Universitas Riau

Tujuan Jangka Pendek penelitian : Memotivasi penduduk lokal agar mampu menjawab berbagai masalah sengketa pertanahan petani kelapa sawit dengan pihak perusahaan. Penyelesaian secara hukum bukanlah penyelesaian yang terbaik dalam menyelesaikan konflik antar petani dengan pihak perusahaan, tetapi masyarakat adat memiliki cara penyelesaian konflik yang tertuang dalam kearifan lokal masing masing adat. *Tujuan jangka pandang penelitian* : Resolusi penyelesaian konflik dengan kearifan lokal dapat menjadi jalan ke luar di tengah kesemrawutan bangsa dalam menghadapi krisis jati diri dan membangun kesejahteraan ekonomi dengan wawasan kearifan lokal. *Target khusus* yang ingin dicapai adalah memulihkan rasa harga diri, percaya diri, kecintaan kerja, kesadaran serta tanggungjawab masyarakat terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya secara wajar.

Metode yang digunakan yaitu Focus Discussion Group (FGD) Bersumberdaya Masyarakat yaitu (1) Merubah sikap dan tingkah laku masyarakat agar mereka memiliki sikap dan perilaku yang kondusif dalam keberagaman melalui komunikasi antarbudaya; (2) Meningkatkan dan terciptanya kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam mendukung komunikasi antarbudaya, sehingga konflik antara sesama petani kelapa sawit maupun dengan pihak perusahaan dapat dihindarkan dan; (3). Membantu mengubah peranserta masyarakat sebagai penerima layanan menjadi partisipan yang aktif dalam komunikasi antarbudaya sehingga tidak terjadi konflik horizontal. Untuk pengumpulan data diadakan observasi, dan wawancara mendalam terhadap petani kelapa sawit, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan. Sedangkan analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit memicu terjadinya konflik horizontal pada petani kebun kelapa sawit; (2) Prosedur jual beli tanah pihak ketiga tidak melalui prosedur bahkan perampasan hak pada petani; (3) ketidakjelasan regulasi lahan yang kurang responsive dan berpihak pada kepentingan rakyat Rokan Hilir; (4) kurang optimalnya pemetaan fungsi lahan untuk pertanian,kehutanan dan pertambangan tidak jelas; (5) kurang optimalnya fungsi lahan tanah, baik untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya air maupun sumber daya manusia.

Perlu reformasi agraria, sebab UU nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Semangatnya perlu dikembalikan pada keberpihakan terhadap rakyat petani yang merupakan mayoritas di Kabupaten Rokan Hilir. Di samping itu, kemampuan berkomunikasi antar budaya sesama petani kelapa sawit dapat menciptakan komunikasi dua arah yang sangat komprehensif.

Kata Kunci: komunikasi antar budaya, konflik horizontal, petani kelapa sawit

I. Identitas Kegiatan

1. a. Topik : PENELITIAN PRIORITAS NASIONAL MASTER-PLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA 2011-2025
- b. Tema (koridor) : Kelapa Sawit (Sumatera)
2. Ketua Peneliti :
 - (a) Nama Lengkap : Prof.Dr.Walder E.Tinambunan,Drs.,MS
 - (b) Bidang Keahlian : Ilmu Komunikasi
3. Anggota Peneliti :

No	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi	Curahan Waktu
1	Ir.Rusmadi Awza, MSi	Pertanian/Komunikasi	Univ. Riau	30 jam/minggu
2	Nurjanah, MSi	Metodolgi	Univ. Riau	30 jam/minggu

4. Isu Strategis:

Kemajemukan masyarakat bisa mengandung kesulitan, karena dapat menjadi picu bagi lahirnya disintegrasi yang mengarah pada terganggunya stabilitas nasional maupun daerah. Gagalnya komunikasi lintas budaya mengakibatkan gangguan kantibmas yang muncul tidak hanya berbentuk kasus kriminalitas konvensional yang dilakukan oleh individu dan kelompok tetapi juga gangguan kantibmas yang berskala luas sehingga dapat mengancam kesatuan dan persatuan di daerah dan bahkan bangsa. Misalnya, Konflik lahan petani kebun sawit di Rokan Hilir sering terjadi dan yang menjadi korbannya masyarakat petani yang tidak mampu melakukan perlawanan terhadap pemodal maupun kelompok pengusaha yang bekerjasama dengan oknum-oknum aparat pemerintahan tertentu.

Gangguan kantibmas yang didasarkan pada etnosentrisme saat ini semakin kompleks, karena dihadapkan pada perkembangan situasi yang penuh dengan tantangan di samping dinamika masyarakat yang cukup tinggi. Upaya menciptakan konflik dan kerusuhan antar

etnis dan umat beragama memungkinkan untuk terjadi jika masyarakat hanya berorientasi pada etnosentrisme.

Adanya intimidasi, ganti rugi tanah yang tidak sesuai, penguasaan lahan secara paksa dan sebagainya menimbulkan prasangka sosial atau stereotipe masyarakat tempatan terhadap pertumbuhan penduduk yang begitu besar di Kabupaten Rokan Hilir. Karena arus migran penduduk kadang-kadang tidak terkendali, maka muncul pula ketidakpercayaan masyarakat lokal kepada pemerintah, di mana masyarakat lokal seolah-olah memandang pemerintah bekerjasama dengan pendatang untuk merugikan masyarakat lokal. Muncullah konflik yang adakalanya menimbulkan hambatan dalam perjalanan ruang gerak pembangunan daerah.

Di tengah gelombang kekerasan, keserakahan dan krisis identitas budaya lokal yang telah melumat habis ikatan kemanusiaan dan kebersamaan di Kabupaten Rokan Hilir, ternyata masih ada kekuatan yang terus dipelihara untuk memperkuat teladan dan kearifan budaya di kalangan masyarakat adat. Kearifan menyelesaikan konflik, pertikaian melalui pendekatan kemanusiaan dan persaudaraan yang sangat luhur merupakan kearifan budaya berupa tradisi dalam menyelesaikan konflik.

5. Topik Kegiatan :

**FUNGSI KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DALAM MENGURANGI KONFLIK
HORIZONTAL DAN SENGKETA TANAH PADA PETANI KELAPA SAWIT DI
KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU**

6. Obyek kegiatan (jenis material yang diteliti dan segi kegiatan) : Petani Kelapa Sawit /Focus Group Discussion : (FGD) dan Penelitian
7. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

8. Hasil yang ditargetkan (beri penjelasan) : Memulihkan rasa harga diri, percaya diri, kecintaan kerja sebagai petani, kesadaran serta tanggungjawab komunitas terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan sosialnya secara wajar sebagai wujud dari komunikasi antar budaya.
9. Instansi lain (mitra) yang terlibat : Tidak ada
10. Sumber biaya dari mitra : Rp.....
11. Keterangan yang dianggap perlu : Sumber biaya dari mitra melalui APBD Rokan Hilir 2013, jumlahnya dalam proses pembahasan

BAB I.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kemiskinan, membuat seseorang melakukan migrasi ke daerah yang dianggap dapat memperbaiki taraf hidupnya. Namun, adakalanya dalam interaksi sosial menimbulkan konflik sosial apabila masyarakat saling tidak memahami norma-norma sosial, atau aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Akhirnya, terjadi konflik sosial secara horizontal atau perselisihan yang disebabkan ketidak selarasan antara tindakan, norma, nilai, dan nilai sosial dalam interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Konflik di beberapa daerah Indonesia sering terjadi. Konflik sosial Lampung merupakan serangkaian konflik berdarah, pertikaian warga, dan perusahaan silih berganti terjadi. Konflik Jambi dengan aksi massa berlatar perebutan lahan yang sampai menewaskan satu orang. Kerusuhan berdarah di Way Panji Kabupaten Lampung Selatan menewaskan 14 orang dan menghancurkan 400 rumah tepat pada hari Sumpah Pemuda bertikai karena persoalan ketersinggungan dan sentiment antaretnis.

Konflik berlatar belakang perebutan lahan hutan eks hak pemanfaatan hutan nyaris tanpa pengelola dan pengamanan selama enam tahun. PT LAJ mengantongi izin pengelolaan hutan untuk kepentingan industry tahun 2010. Namun, perusahaan mendapati sebagian lahan diokupansi pendatang asal Ssumatera Utara dan Riau. Jual beli tanah Rp.1 juta per hektar pun marak untuk pembukaan kebun sawit. Dampaknya, secara umum di masyarakat akar bawah kini terjadi “distrust” atau ketidakpercayaan terhadap institusi penegak hukum dan pemerintahan.

Beberapa kasus tanah petani kelapa sawit yang terjadi di Kepenghuluan Kota Paret tahun 1992 Kecamatan Simpang Kanan antara Timbang Sianipar dengan masyarakat seluas 500 ha mengakibatkan satu unit kantor pos Polisi dibakar, 8 orang masyarakat ditangkap dan diadili serta salah seorang dari pihak masyarakat bernama Rizal depresi kemudian meninggal. Daerah Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah terjadi bentrok antara masyarakat Suku Hamba Raja yang berjumlah 15.000 orang dengan ribuan karyawan PT.Ivomas tahun 2003 disebabkan tanah yang dimiliki PT Ivomas adalah tanah milik hak ulayat suku hamba raja. Selanjutnya sengketa tapal batas antara Riau dengan Sumatera Utara tahun 2008 yang tidak kunjung selesai menyebabkan beberapa orang masyarakat Pasir Limau Kapas ditangkap dan diadili di Sumatera Utara dan 1 unit alat berat kelompok tani KSK dibakar. Terakhir di Kepenghuluan Sei Daun Kecamatan Pasir Limau Kapas tanah masyarakat banyak yang diperjual belikan oleh aparat desa kepada pengusaha yang mempunyai modal sehingga terjadi bentrok antara pekerja dari pihak pengusaha dengan masyarakat.

Masyarakat Rokan Hilir yang sejak dari dulu merasa hidupnya tidak terganggu, akhir-akhir ini akan mendapat gangguan karena pertumbuhan penduduk yang tinggi dan ditambah lagi dengan penguasaan-penguasaan lahan yang mereka olah selama ini dirampas atau dimiliki oleh pihak pengusaha perkebunan dengan berbagai cara. Adanya intimidasi, ganti rugi tanah yang tidak sesuai, penguasaan lahan secara paksa dan sebagainya menimbulkan prasangka sosial atau stereotipe masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir. Karena petani kelapa sawit sering menjadi pihak yang dirugikan oleh pengusaha kelapa sawit, maka muncul pula ketidakpercayaan petani kelapa sawit kepada pemerintah, di mana petani kelapa sawit

memandang pemerintah bekerjasama dengan pengusaha untuk merugikan petani. Muncullah konflik yang adakalanya menimbulkan hambatan dalam ruang gerak pembangunan daerah.

2. Tujuan Khusus

2.1 Menangani masalah-masalah konflik horizontal pada masyarakat petani kelapa sawit yang disebabkan lahan pertanahan khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hilir yang masyarakatnya multikultural, sehingga terbina integrasi sosial

2.2 Mengurangi kesenjangan komunikasi antarsuku yang disebabkan perbedaan-perbedaan bahasa daerah, ekonomi maupun adat istiadat sesudah menjadi warga masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

2.3 Tersusunnya rencana pemerintah kabupaten dalam antisipasi pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga tidak menimbulkan konflik horizontal

3. Urgensi Penelitian

Karena janji pembauran agraria tidak dipenuhi pemerintah, proses proletarisasi di pedesaan terus berlangsung. Masyarakat desa, mayoritas petani, yang tadinya memiliki tanah mulai kehilangan sumber penghasilannya karena tanah tak lagi mereka kuasai. Untuk makan mereka harus menjual tenaga kerjanya karena kehilangan sumber penghidupannya dari tanah. Masyarakat pedesaan sudah makin miskin. Tanah-tanah dalam skala luas sudah dikuasai oleh perusahaan besar. Pemerintah daerah di sisi lain beralih memperjuangkan kepentingan masyarakat desa. Pada hal, jika mau serius membantu kepentingan petani pemerintah tinggal menunaikan saja program pembaruan agraria seperti redistribusi tanah telantar untuk petani.

Berdasarkan hal-hal di atas, sangat perlu melakukan suatu penelitian, sehingga melalui penelitian ini dapat dicarikan solusi atau bentuk komunikasi yang paling tepat untuk membentengi tidak terjadinya konflik yang mengarah kepada stereotipe atau prasangka sosial bersifat horizontal.

BAB II.

STUDI PUSTAKA

a. Kemiskinan dan Interaksi Sosial

Akibat dari pembangunan terutama dibidang ekonomi telah terjadi jurang pemisah antara orang miskin dan orang kaya. Hal itu disebabkan kelompok-kelompok yang dapat memanfaatkan pembangunan yang dilakukan pemerintah semakin mantap. Sedangkan kelompok yang belum dapat atau belum beruntung untuk ikut bersaing mendapatkan kekayaan dan keuntungan semakin sulit.

Adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin itu tetap merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia untuk memecahkannya. Kemiskinan begitu lekat dengan masyarakat desa. Gambaran desa yang menunjukkan serba kekurangan dan secara geografis maupun mehyangkut aspek-aspek kehidupan masyarakat sering dijadikan sebagai wujud dari kemiskinan, ekonomi, pendapatan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan ketersediaan sumber-sumber ekonomi. Maka, apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, dikatakan berada di bawah garis kemiskinan.

Berkaitan dengan interaksi sosial melalui komunikai, dalam penelitian ini konsep yang digunakan adalah menurut DeVito bahwa efektivitas komunikasi itu sangat ditentukan oleh sejauhmana seseorang mempunyai sikap;

(1) Keterbukaan

Sikap seorang komunikator yang membuka semua informasi tentang pribadinya kepada komunikan, sebaliknya menerima semua informasi yang relevan tentang dan dari komunikan dalam rangka interaksi antarpribadi. Selain itu juga menilai pesan secara obyektif dengan menggunakan data dan keajekan logika.

(2) Empati

Kemampuan seorang komunikator untuk menerima dan memahami orang lain seperti ia menerima dirinya sendiri; jadi ia berpikir, merasa, berbuat terhadap orang lain sebagaimana ia berpikir, merasa dan berbuat terhadap dirinya sendiri. Rakhmat (1988) mengutip pendapat Scotland (1978) dan Bennett (1979) empati ialah membayangkan diri kita pada kejadian yang menimpa orang lain, kita berusaha melihat seperti orang lain melihat, merasakan seperti orang lain merasakannya.

(3) Perasaan positif

Perasaan seorang komunikator bahwa pribadinya, komunikannya, serta situasi yang melibatkan keduanya sangat mendukung (terbebas dari ancaman, tidak dikritik dan ditantang)

(4) Memberi dukungan

Suatu situasi dan kondisi yang dialami komunikator dan komunikan terbebas atmosfer ancaman, tidak dikritik dan ditantang. Rakhmat (1989) mengatakan sikap suportif atau

memberikan dukungan ialah sikap yang mengurangi sikap defensif dalam komunikasi, orang yang defensif bila ia tidak menerima, tidak jujur, dan tidak empatik.

(5) Merasa seimbang

Suatu suasana yang adil antara komunikator dengan komunikan dalam hal kesempatan yang sama untuk berpikir, merasa dan bertindak. dalam suatu makna yang sama tentang setiap pesan dalam komunikasi antarbudaya atau antaretnik.

Selanjutnya, ada tiga faktor penentu prasangka yang diduga mempengaruhi komunikasi yang menurut Poortinga (1990) yaitu;

(1) *Stereotip.*

Stereotip adalah sikap dan malahan karakter yang dimiliki seseorang untuk menilai orang lain semata-mata berdasarkan pengelompokan kelas atau pengelompokan yang dibuatnya sendiri.

Stereotip cenderung mengarah pada sikap yang negatif terhadap orang lain. Menurut Gerungen (1988) stereotip merupakan suatu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat dan watak pribadi orang/golongan lain yang umumnya bercorak negatif.

(2) *Jarak Sosial.*

Jarak sosial merupakan aspek lain dari prasangka sosial yang menunjukkan tingkat penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam hubungan yang terjadi di antara mereka.

Gerungen (1988) mengukur penerimaan seseorang terhadap orang lain dalam unsur-unsur seperti; (a) kesiediaan untuk menikah dengan orang lain; (b) bergaul rapat sebagai kawan anggota dalam klubnya; (c) menerima sebagai tetangga; (d) menerimanya sebagai rekan

sejabat; (e) menerimanya sebagai warga negaranya; (f) menerimanya sebagai pengunjung negaranya; dan (g) tidak ingin menerimanya di dalam negaranya.

Peneliti berasumsi bahwa semakin dekat jarak sosial seorang komunikator dari suatu etnik dengan seorang komunikan dari etnik lain maka semakin efektif pula komunikasi di antara mereka, sebaliknya jika semakin jauh jarak sosial maka semakin kurang efektif dan memungkinkan terjadinya prasangka sosial.

(3) *Diskriminasi.*

Diskriminasi merupakan faktor yang merusak kerjasama antarmanusia maupun komunikasi di antara mereka. Doob (1985) mengakui diskriminasi merupakan suatu perilaku yang ditujukan untuk mencegah suatu kelompok atau membatasi kelompok lain yang berusaha memiliki atau mendapatkan sumberdaya. Prasangka dan diskriminasi merupakan dua belahan mata uang, prasangka dipandang sebagai ideologi atau keyakinan dan diskriminasi adalah terapan ideologi tersebut.

Mengurangi atau mengakhiri konflik etnis menurut Dianne Shilling (dalam Alo, 2009) mengemukakan; (1) *abandoning-* menghilangkan konflik; (2) *avoiding-* menghindari konflik; (3) *dominating-* menguasai konflik; (4) *obliging-* melayani konflik; (5) *getting help-* mencari pertolongan; (6) *humor-* bersikap humoris; (7) *posponing-* menunda penyelesaian; (8) *compromis-* kompromi; (9) *integrating-* mengintegrasikan; dan (10) *colaboration-* kerjasama dan memecahkan masalah; (11) *konfrontasi-*; dan (12) *akomodasi.*

Perbenturan budaya terjadi pada migran dengan masyarakat lokal. Dalam perbenturan budaya tersebut, akan terjadi yaitu; (1) Adanya keterasingan budaya yang

dirasakan oleh masyarakat lokal sebagai akibat masuknya para migran; (2) Timbulnya perasaan bingung, karena kenyataan budaya yang dilihatnya berbeda dengan budaya yang dianutnya; (3) Kebingungan itu akan menjurus, pada perasaan tidak berdaya terhadap terpaan budaya asing; dan (4) Akhirnya menimbulkan perbedaan dalam memperbaiki sosial dan ekonomi dalam multi kultural.

Menurut Ida Pariastuti dalam Jurnal Ilmiah Komunikasi (2009), budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada budaya tempat kita dibesarkan. Budaya merupakan landasan komunikasi. Apabila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktek-praktek komunikasi

Lebih lanjut Tinambunan (2004) dalam penelitiannya mengatakan bahwa: Kebudayaan manusia tidak akan ada tanpa bahasa, karena bahasa terlibat dalam semua aspek kebudayaan. Hubungan lain antara bahasa dengan kebudayaan ialah bahwa bahasa sebagai sistem komunikasi, mempunyai makna hanya dalam kebudayaan yang menjadi wadahnya.

Bertitik tolak dari pendapat di atas maka akan terjadilah hal-hal keterasingan budaya yang dirasakan oleh masyarakat setempat akibat masuknya budaya asing. Timbulnya perasaan bingung, karena kenyataan budaya yang dilihatnya berbeda dengan budaya yang dianutnya. Kebingungan itu akan menjurus pada perasaan tidak berdaya terhadap terpaan budaya asing. Apabila keteguhan untuk memelihara kebudayaan lemah,

dan pengetahuan untuk menyeleksi rendah, maka ketidak-berdayaan itu akan berakhir dengan budaya yang ada; dan sebaliknya bila kehadiran budaya asing dianggap sebagai hal yang lumrah dan perbedaan dianggap sebagai hal yang biasa, serta pengetahuan menyeleksi ada, maka kehadiran budaya asing tidak akan berpengaruh terhadap tatanan budaya yang sudah ada.

Penyebab Konflik:

Konflik terjadi karena adanya interaksi yang disebut komunikasi. Hal ini dimaksudkan apabila kita ingin mengetahui konflik berarti kita harus mengetahui kemampuan dan perilaku komunikasi. Semua konflik mengandung komunikasi, tapi tidak semua konflik berakar pada komunikasi yang buruk. Menurut Myers, jika komunikasi adalah suatu proses transaksi yang berupaya mempertemukan perbedaan individu secara bersama-sama untuk mencari kesamaan makna, maka dalam proses itu, pasti ada konflik (1982). Konflik pun tidak hanya diungkapkan secara verbal tapi juga diungkapkan secara nonverbal seperti dalam bentuk raut muka, gerak badan, yang mengekspresikan pertentangan (Stewart & Logan, 1993). Konflik tidak selalu diidentifikasi sebagai terjadinya saling baku hantam antara dua pihak yang berseteru, tetapi juga diidentifikasi sebagai ‘perang dingin’ antara dua pihak karena tidak diekspresikan langsung melalui kata – kata yang mengandung amarah.

Konflik diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab

dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

- Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.
- Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

- Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Konflik seringkali diterjemahkan mengandung konotasi negatif, yang cenderung diartikan sebagai lawan kata dari pengertian kondusif, harmonis, dan perdamaian. Konflik acapkali diasosiasikan dengan pengertian kekerasan atau pertentangan dan ancaman kekerasan. Pandangan yang demikian saat ini sulit untuk diubah, walau konflik sebenarnya perlu dimaknai sebagai suatu ekspresi perubahan dari perkembangan masyarakat. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan karena hadir apabila terjadi pertentangan, tetapi harus diakui keberadaannya, dikelola dan diubah menjadi suatu kekuatan bagi perubahan yang bersifat positif. Konflik mengandung pengertian yang sangat cair, cepat berubah tanpa ada perencanaan atau direncanakan dan selalu bermakna ganda. Dari waktu ke waktu pergeseran terjadi dalam hal intensitas, sifat, jenis, penyebab, dan lokasi konflik serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya di samping perubahan teknologi dalam modernisasi.

Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif (Stewart & Logan, 1993). Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam manajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak – pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu – waktu terjadi kembali.

Duverger (1993) berpendapat bahwa setiap fenomena politik memiliki aspek konflik dan integrasi. Kekuasaan merupakan salah satu fenomena politik yang penting. Kekuasaan merupakan sumber daya langka yang menjadi penyebab konflik. Orang yang mempunyai

kekuasaan cenderung untuk mempertahankan kekuasaan. Di samping itu, ada pihak lain yang menentang kekuasaan dan ingin merebut kekuasaan itu untuk tujuan yang sama.

Kekuasaan mempunyai aspek integrasi dalam arti bahwa kekuasaan dipergunakan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan; sebagai pelindung kepentingan dan kesejahteraan umum melawan tindakan berbagai kelompok kepentingan.

Selanjutnya Duverger (1993) mengatakan: Konflik dan integrasi bukan dua aspek yang kontradiktif di dalam politik; mereka juga saling melengkapi satu sama lain. Dalam mempelajari sebab-sebab antagonisme, kita mendapatkan bahwa hal ini agak ambivalen. Antagonisme menghasilkan konflik, akan tetapi, dalam kesempatan tertentu, juga menolong membatasi konflik dan meningkatkan integrasi. Berbicara secara umum, integrasi dalam hal-hal tertentu muncul sebagai akibat terakhir dari antagonisme politik, dan paham integrasi memainkan peranan penting justru di dalam perkembangan konflik. Setiap tantangan terhadap ketertiban sosial yang ada meliputi suatu visi dan rencana bagi suatu ketertiban sosial yang lebih tinggi dan lebih otentik. Setiap perjuangan berisikan tujuan tentang perdamaian dan merupakan usaha untuk merealisasikan tujuan tersebut. Banyak yang berpendapat bahwa konflik dan integrasi tidak berlawanan, akan tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari proses umum yang sama bahwa antagonisme cenderung, justru oleh perkembangannya, ke arah menghapus dirinya sendiri dan berikutnya menghasilkan harmoni sosial.

Maurice Duverger (1993) mengajukan penyebab konflik bertolak dari sudut pandang pelaku konflik. Penyebab antagonisme politik (konflik politik) meliputi individual dan kolektif. Sebab-sebab individual menurut Duverger, karena terdapat perbedaan bakat individual di antara manusia. Ia mendasarkan diri pada konsep-konsep biologi Charles

Darwin tentang *struggle for life* yang menyatakan bahwa setiap individu harus bertempur melawan yang lain untuk kelangsungan hidup dan hanya yang paling mampu akan memenangkannya. Dari kecenderungan ini menjelma menjadi perjuangan untuk memuaskan kebutuhan manusia. Dalam arena politik hal ini menjadi perjuangan untuk posisi utama. Selain itu, dalam diri manusia terdapat naluri untuk berkuasa yang dianggap sebagai kecenderungan manusiawi yang fundamental. Ambisi individual ini merupakan faktor primer di dalam konflik politik. Proses-proses demokratis tidak saja berlaku untuk mengungkapkan pergolakan politik oleh cara-cara non violent; mereka juga ditentukan untuk memutuskan konflik dengan kompromi (Duverger, 1993).

Ritzer (1992) menjelaskan bahwa ide pokok tentang konflik pada intinya dapat terbagi menjadi tiga pikiran besar : *Pertama*, bahwa masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang ditandai adanya pertentangan terus menerus di antara unsur-unsurnya. *Kedua*, setiap elemen akan memberikan sumbangan pada disintegrasi sosial. *Ketiga*, keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Sedangkan teori struktural yang ditentang oleh teori konflik mengandung pula tiga pemikiran utama : *Pertama*, bahwa masyarakat berada pada kondisi statis, atau tepatnya berada pada kondisi keseimbangan. *Kedua*, setiap elemen atau institusi memberikan dukungan terhadap stabilitas. *Ketiga*, anggota masyarakat terikat secara informal oleh norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum.

Pengertian konflik, sebagaimana dikemukakan Lewis A.Coser (1972) bahwa: “konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status,

kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka". Lebih lanjut, Coser mengemukakan bahwa konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional positif, apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya bersifat negatif bila bergerak melawan struktur atau bertentangan dengan nilai-nilai utama.

Lebih lanjut Beebe & Masterson (1994) menyatakan konflik hanya mempunyai dampak negatif apabila; (1) konflik itu menghalangi kita untuk mencapai tujuan bersama, (2) mengganggu kualitas dan produktivitas masyarakat, dan (3) mengancam kes Curle (1971) yang dikutip Lederach (1998) dengan menggambarkan kontinum hubungan tersebut. Pergerakan dari keadaan konflik kepada peluang untuk menyelesaikan konflik yang terjadi sampai pada situasi damai, digambarkan dalam 4 tahap utama, sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah *tahap konflik tersembunyi*, dimana orang masih tidak menyadari adanya ketidakseimbangan dari kekuatan dan adanya ketidakadilan yang mempengaruhi kehidupannya. Jika kesadaran akan adanya konflik meningkat, maka timbul perubahan yaitu memasuki tahap konfrontasi.
2. Tahap kedua adalah *tahap konfrontasi*, yaitu suatu keadaan dimana konflik diekspresikan secara terbuka, baik dengan memilih cara kekerasan maupun tanpa kekerasan atau kombinasi dari keduanya. Apabila tahap kedua tersebut akan menimbulkan keseimbangan kekuatan dan pengakuan eksistensi kedua pihak yang berkonfrontasi, hal ini akan menuntun kepada suatu penyelesaian konflik.

3. Tahap ketiga yaitu *tahap negosiasi*, kedua belah pihak yang berkonflik telah menyadari adanya konflik dan mengakui posisi dan eksistensi masing-masing pihak sehingga memungkinkan untuk melakukan negosiasi.
4. Tahap keempat, dengan berhasilnya negosiasi, maka akan mengarahkan penyelesaian konflik dan perbaikan hubungan antar kedua belah pihak. Kondisi inilah yang disebut *hidup berkelanjutan (survive)* atau mencapai situasi berkeadilan dan damai.

Mengurangi atau mengakhiri konflik etnis menurut Dianne Shilling (dalam Alo, 2009) mengemukakan; (1) *abandoning*- menghilangkan konflik; (2) *avoiding*- menghindari konflik; (3) *dominating*- menguasai konflik; (4) *obliging*- melayani konflik; (5) *getting help*- mencari pertolongan; (6) *humor*- bersikap humoris; (7) *posponing*- menunda penyelesaian; (8) *compromis*- kompromi; (9) *integrating*- mengintegrasikan; dan (10) *colaboration*- kerjasama dan memecahkan masalah; (11) *konfrontasi*; dan (12) akomodasi.

Perbenturan budaya terjadi pada migran dengan masyarakat lokal. Dalam perbenturan budaya tersebut, akan terjadi yaitu; (1) Adanya keterasingan budaya yang dirasakan oleh masyarakat lokal sebagai akibat masuknya para migran; (2) Timbulnya perasaan bingung, karena kenyataan budaya yang dilihatnya berbeda dengan budaya yang dianutnya; (3) Kebingungan itu akan menjurus, pada perasaan tidak berdaya terhadap terpaan budaya asing; dan (4) Akhirnya menimbulkan perbedaan dalam memperbaiki sosial dan ekonomi dalam multi kultural.

Menurut Ida Pariastuti dalam Jurnal Ilmiah Komunikasi (2009), budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa bicara dengan siapa, tentang apa, dan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia

miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Seluruh perbendaharaan perilaku kita sangat bergantung pada budaya tempat kita dibesarkan. Budaya merupakan landasan komunikasi. Apabila budaya beraneka ragam, maka beraneka ragam pula praktek-praktek komunikasi

Lebih lanjut Tinambunan (2004) dalam penelitiannya mengatakan bahwa: Kebudayaan manusia tidak akan ada tanpa bahasa, karena bahasa terlibat dalam semua aspek kebudayaan. Hubungan lain antara bahasa dengan kebudayaan ialah bahwa bahasa sebagai sistem komunikasi, mempunyai makna hanya dalam kebudayaan yang menjadi wadahnya.

Bertitik tolak dari pendapat di atas maka akan terjadilah hal-hal keterasingan budaya yang dirasakan oleh masyarakat setempat akibat masuknya budaya asing. Timbulnya perasaan bingung, karena kenyataan budaya yang dilihatnya berbeda dengan budaya yang dianutnya. Kebingungan itu akan menjurus pada perasaan tidak berdaya terhadap terpaan budaya asing. Apabila keteguhan untuk memelihara kebudayaan lemah, dan pengetahuan untuk menyeleksi rendah, maka ketidak-berdayaan itu akan berakhir dengan budaya yang ada; dan sebaliknya bila kehadiran budaya asing dianggap sebagai hal yang lumrah dan perbedaan dianggap sebagai hal yang biasa, serta pengetahuan menyeleksi ada, maka kehadiran budaya asing tidak akan berpengaruh terhadap tatanan budaya yang sudah ada.

Lewis A.Coser (1972) mengatakan bahwa: “konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak

yang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan atau menghancurkan lawan mereka”. Lebih tegas lagi dikemukakan Coser bahwa konflik dapat bersifat fungsional secara positif maupun negatif. Fungsional positif, apabila konflik tersebut berdampak memperkuat kelompok, sebaliknya bersifat negatif bila bergerak melawan struktur atau bertentangan dengan nilai-nilai utama. Sementara itu Beebe & Masterson (1994) menyatakan konflik hanya mempunyai dampak negatif apabila ; (1) konflik itu menghalangi kita untuk mencapai tujuan bersama, (2) mengganggu kualitas dan produktivitas masyarakat, dan (3) mengancam kesatuan.

Konflik dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
- Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

- Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.
- Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang

mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.

Konflik tidak selamanya berkonotasi buruk, tapi bisa menjadi sumber pengalaman positif (Stewart & Logan, 1993). Hal ini dimaksudkan bahwa konflik dapat menjadi sarana pembelajaran dalam manajemen suatu kelompok atau organisasi. Konflik tidak selamanya membawa dampak buruk, tetapi juga memberikan pelajaran dan hikmah di balik adanya perseteruan pihak – pihak yang terkait. Pelajaran itu dapat berupa bagaimana cara menghindari konflik yang sama supaya tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan bagaimana cara mengatasi konflik yang sama apabila sewaktu – waktu terjadi kembali.

b. Etnisitas :

Konsep etnisitas sangat berhubungan dengan konsep primordialisme. Didalamnya terjalin hubungan kelompok yang sangat kuat. Identitas kelompok sangat ditonjolkan, rasa satu agama, ras, suku dan simbol-simbol kelompok lebih utama.

Istilah lain menyebutkan etnisiti, yaitu sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri yang sama dalam hal budaya dan biologis serta bertindak menurut pola-pola yang sama. Menurut Handelman (dalam Tilaar, 2007), ada empat tingkat perkembangan yang dipertunjukkan di dalam komunitas budaya manusia yang di antaranya adalah kategori etnis, jaringan etnis, asosiasi etnis, dan masyarakat etnis.

Etnisitas terbangun dalam relasi kekuasaan antar kelompok. Ia merupakan sinyal keterpinggiran, sinyal tentang pusat dan pinggiran, dalam konteks sejarah yang selalu berubah. Di sini, pusat dan pinggiran dibentuk dalam representasi politik. Seperti argumen Brah (1996), Adalah penting untuk menjadikan sebuah aksioma bahwa apa yang direpresentasikan sebagai 'pinggiran' tidaklah sepenuhnya pinggiran tetapi merupakan efek dari representasi itu sendiri. 'Pusat' tidaklah lebih pusat daripada pinggiran.

Konsep etnisitas bersifat relasional yang berkaitan dengan identifikasi diri dan asal-usul sosial. Apa yang kita pikirkan sebagai identitas kita tergantung kepada apa yang kita pikirkan sebagai bukan kita. Orang Jawa bukan Madura, Batak dll. Konsekuensinya, etnisitas akan lebih baik dipahami sebagai proses penciptaan batas-batas formasi dan ditegakkan dalam kondisi sosio-historis yang spesifik (Barth 1969).

Konsepsi kulturalis tentang etnisitas merupakan sebuah usaha yang berani untuk melepaskan diri dari implikasi rasis yang inheren dalam sejarah konsep ras. Seperti ditulis Stuart Hall (1996): Jika subjek kulit hitam dan pengalaman kulit hitam tidak distabilkan oleh alam atau esensi lainnya, maka pastilah ia terkonstruksi secara historis, kultural, dan politis. Term etnisitas mengakui kedudukan sejarah, bahasa, dan kebudayaan dalam konstruksi subjektivitas dan identitas, seperti halnya fakta bahwa semua wacana selalu punya tempat, posisi, situasi, dan semua pengetahuan selalu kontekstual."

Masalah dalam konsepsi kulturalis tentang etnisitas adalah diabaikannya pertanyaan-pertanyaan tentang kekuasaan dan ras. Etnisitas dapat dikembangkan ke dalam diskusi tentang multikulturalisme, untuk menunjukkan formasi sosial yang beroperasi dalam kelompok yang plural dan sejajar, daripada kelompok yang terasialisasi secara hirarkis. Konsekuensinya, Hooks (1990) dan Gilroy (1987) lebih suka memakai konsep "ras", bukan karena ia berhubungan dengan keabsolutan biologis atau kultural, tetapi karena ia berhubungan dengan isu kekuasaan. Sebaliknya, Hall (1996) mencoba membangun kembali konsep etnisitas dengan memusatkan perhatian pada di mana kita semua terlokasikan secara etnis.

c. *Komunikasi Antar Budaya*

Budaya berkenaan dengan cara manusia hidup. Budaya menempatkan diri dalam pola-pola bahasa dan dalam bentuk kegiatan. Perilaku yang berfungsi sebagai model tindakan dan penyesuaian diri dengan gaya komunikasi yang memungkinkan orang-orang tinggal dalam satu tingkat perkembangan teknis tertentu dan pada saat tertentu. Budaya juga memainkan hal-hal yang berkenaan dengan sifat-sifat objek materi kehidupan sehari-hari. Budaya berkesinambungan dan hadir di mana-mana; budaya meliputi semua peneguhan perilaku yang diterima suatu periode kehidupan.

Komunikasi antar budaya terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Dalam keadaan demikian, kita segera dihadapkan kepada masalah-masalah yang ada dalam suatu situasi di mana suatu pesan di sandi dalam suatu budaya dan harus di sandi balik dalam budaya lain. Seperti diketahui, budaya mempengaruhi orang yang berkomunikasi.

Budaya bertanggung jawab atas seluruh perbendaharaan perilaku komunikatif dan makna yang dimiliki setiap orang. Konsekuensinya, ialah perbendaharaan-perbendaharaan yang dimiliki dua orang yang berbeda budaya akan menimbulkan makna yang berbeda-beda pula, yang dapat menimbulkan segala macam kesulitan. Namun, melalui studi dan pemahaman atas komunikasi antar budaya, kita dapat mengurangi atau hampir menghilangkan kesulitan-kesulitan ini (*Mulyana dan Rakhmat, 1990*).

Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya juga turut menentukan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan. *Mulyana dan Rakhmat (1990)* mengetengahkan pendapat *Michael Prosser* yang menganjurkan enam masalah pokok dalam komunikasi budaya yaitu:

- (1) Menyadari adanya prinsip persamaan dan perbedaan antara kelompok budaya. Prinsip didasarkan pada kenyataan bahwa setiap budaya memiliki unsur-unsur yang sangat berbeda, di samping hal-hal yang relatif sama;
- (2) Prinsip adanya konflik. Konflik ini timbul karena adanya budaya antara berbagai individu yang berinteraksi;
- (3) Prinsip adanya pengendalian dan kontrol;
- (4) Masalah-masalah komunikasi yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan dalam kemampuan dan penguasaan teknologi;
- (5) Masalah yang berkisar pada dua kutub pendapat yang berbeda dalam pelestarian budaya. Yaitu di satu pihak menghendaki pelestarian budaya, dan dilain pihak menganggap perubahan budaya sebagai sesuatu yang wajar dan alami; dan

- (6) Masalah penjajahan dan ketergantungan budaya. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa kebudayaan yang kaya dan maju selalu mendominasi budaya yang lebih sederhana.

Dalam penerapannya, komunikasi antar budaya dapat berwujud berbagai bentuk komunikasi. Namun, secara mendasar komunikasi antar budaya termasuk ke dalam bentuk komunikasi antar personal. Komunikasi antar personal merupakan komunikasi timbal balik dalam bentuk percakapan antara dua orang atau tiga orang, baik secara tatap muka maupun bermedia. Namun, gejala komunikasi antar budaya dapat juga berlangsung dalam bentuk komunikasi kelompok atau komunikasi massa. Dengan fleksibilitas semacam ini berarti komunikasi antar budaya dapat pula memanfaatkan berbagai media dalam penerapannya.

Budaya seperti jagug telah dikemukakan di muka merupakan perilaku yang sangat kompleks dan mencakup segala aspek kehidupan manusia. *E. B. Tylor* dalam *Soekanto*, (1986) menyatakan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang menyangkut pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan lain perkataan kebudayaan mencakup segala sesuatu yang dipelajari manusia dalam bermasyarakat. Budaya pun berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar, berpikir, praktek komunikasi yang semuanya itu berdasarkan pola-pola budaya. Tanpa sadar manusia dibentuk oleh budaya lingkungannya maka jadilah manusia sebagai produk budaya, demikian pula sebaliknya budaya dibentuk oleh manusia.

Selanjutnya *Poter* dan *Samovar* dalam *Mulyana* dan *Rakhmat* (1990) menyatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi bila produsen pesan adalah anggota suatu budaya dan penerima pesannya adalah anggota suatu budaya lainnya. Artinya

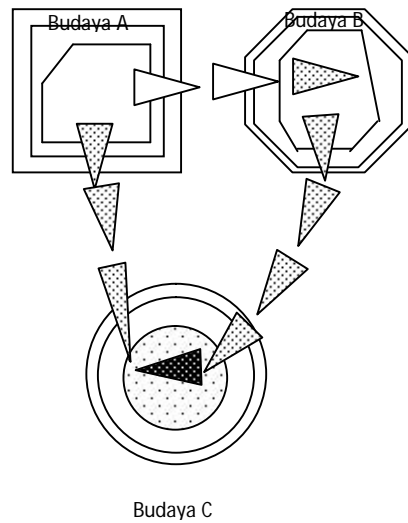
kita dihadapkan pada suatu kesulitan di mana pesan disandi dalam suatu budaya, dan harus disandi balik oleh budaya itu. Sementara kita menyadari bahwa budaya sangat mempengaruhi pola komunikasi. Konsekuensinya suatu makna yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda budaya akan menimbulkan makna yang berbeda pula. Namun kesulitan semacam ini dapat diatasi, paling tidak dikurangi melalui pemahaman komunikasi budaya.

Dalam komunikasi budaya yang efektif, pertama-tama kita harus menyadari faktor-faktor budaya yang mempengaruhi, baik dalam budaya kita maupun dalam budaya orang lain. Untuk itu kita perlu mengetahui perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan budaya. Perbedaan tersebut dapat dijadikan tolok ukur untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul. Sedangkan persamaannya membantu untuk mendekati diri dengan pihak lain yang memiliki budaya yang berbeda.

Selanjutnya *Wilbur Schramm* dalam *Mulyana dan Rakhmat (1990)* mengemukakan beberapa persyaratan untuk mengadakan komunikasi antar budaya yang efektif, yaitu; *Pertama*, adanya sikap menghormati anggota budaya lain sebagai manusia; *Kedua*, harus menghormati budaya lain sebagai mana apa adanya, dan bukan sebagaimana yang kita hendaki; *Ketiga*, ada-lah menghormati hak anggota budaya yang lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak; dan *Keempat*, komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya yang lain.

Untuk lebih menyederhanakan proses penyandi-an komunikasi budaya yang berbeda di bawah ini di gambarkan model komunikasi budaya, yang menggambarkan pengaruh budaya atas individu dan masalah-masalah penyandian dan penyandian balik pesan.

Gambar 1
Komunikasi Antar Budaya



Sumber : Mulyana dan Rahkmat, 1990.-

Lebih lanjut Mulyana dan Rahkmat (1990) menjelaskan bahwa dalam setiap budaya ada bentuk lain yang agak serupa dengan bentuk budaya. Ini menunjukkan individu yang telah dibentuk oleh budaya. Bentuk individu sedikit berbeda dari bentuk budaya yang mempengaruhinya. Ini menunjukkan pula dua hal yaitu; *Pertama*, ada pengaruh lain di samping budaya yang membentuk individu dan; *Kedua*, meskipun budaya merupakan kekuatan dominan yang mempengaruhi individu, orang-orang dalam suatu budaya pun mempunyai sifat-sifat yang berbeda.

BAB III.

PETA JALAN PENELITIAN

a. Penelitian yang telah dilakukan

1. Tinambunan (2004) dalam penelitiannya berjudul: Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antaretnik Tionghoa, Batak, Melayu, Jawa dan Minangkabau di Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa; etnis Tionghoa lebih cenderung tertutup berkomunikasi terhadap etnis lainnya apabila dibandingkan dengan etnis Batak, sehingga etnis Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari lebih membuka diri apabila berkomunikasi dengan sesama etnis Tionghoa.
2. Tinambunan (2008) lebih lanjut mengatakan bahwa; muncul permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan ataupun pelestarian kebudayaan sebagai media komunikasi. Hal itu terjadi karena masyarakat penutur atau pengguna bahasa itu kurang menyadari tentang dirinya sendiri, keinginan, atau pun faktor-faktor lain yang berakibat pada budaya itu. Siapa pun yang masuk sebagai imigran ke daerah baru, tidak boleh memaksakan kehendaknya agar kebudayaan yang dibawanya wajib dilaksanakan pada daerah baru di mana ia tinggal.
3. Tinambunan (2008) dalam penelitian lain yang dilaksanakan di Kabupaten Bengkalis mengungkapkan bahwa: 95,6% kurang setuju dan bahkan tidak setuju apabila penduduk yang pindah ke daerah tujuan memaksakan kebudayaan daerah yang dibawanya untuk dilaksanakan warga lokal. Siapapun tidak mempunyai hak untuk memaksakan kebudayaannya kepada orang lain, sebab hal itu melanggar hak asasi seseorang. Bahkan sebagai migran harus menyesuaikan diri dengan kebudayaan daerah yang baru dijumpainya. Namun, pergeseran budaya terjadi akibat adanya perkawinan lintas etnis sesuai dengan semakin majunya cara berpikir generasi muda.

4. Tinambunan (2010) bahwa “tatanan kehidupan orang Batak selalu bergerak dalam harmoni keseimbangan. Sekali pun orang Batak telah mengadaptasikan nilai-nilai baru, mengadaptasikan diri dengan lingkungan budaya baru, namun mereka tetap tradisional, mempertahankan ikatan-ikatan kekeluargaan..... Perpindahan penduduk sangat menguntungkan apabila masing-masing menjaga dan menghormati masyarakat lain di daerah tempat tinggalnya. Perpindahan penduduk jangan diartikan mengkerdikan masyarakat lokal, tetapi masyarakat lokal dan migran harus bekerjasama dalam membangun daerah tempat tinggalnya”.
5. Tinambunan (2011) lebih lanjut mengemukakan bawa masyarakat dengan kekurangsiapan intelektual, profesional dan mental dalam teknologi informasi modern atau kekuatan globalisasi mengakibatkan terjadinya prasangka sosial di antara etnis. Seharusnya masyarakat memanfaatkan kekuatan yang dimilikinya untuk melestarikan dan mempertahankan efektivitas komunikasi antarbudaya. Kelemahan yang ada perlu diperbaiki sehingga adanya peluang dalam melaksanakan komunikasi antarbudaya, di samping harus pula diwaspadai bahwa ancaman budaya yang menjurus pada konflik-konflik sosial.
6. Tinambunan (2012) mempertajam hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa; Etnosentrisme dalam rasa *in group* menyebabkan prasangka dalam setiap kelompok, sehingga memandang kelompok etnik lain sebagai manusia barbar, bodoh, dan tidak beradab. Hal ini terjadi karena dalam prasangka tercakup sikap antipati yang didasarkan suatu cara menggeneralisasikan yang salah dan tidak fleksibel.

b. Tahapan Penelitian:

Penelitian dibedakan atas tiga tahapan yaitu tahap-1 rancangan penelitian pengembangan komunikasi antar budaya, tahap-2 sosialisasi komunikasi antar budaya dalam mengurangi konflik horizontal (isi kandungan) melalui FGD, tahap-3 keterlibatan masyarakat dalam harmonisasi komunikasi antar budaya.

c. Rencana arah penelitian setelah kegiatan selesai

Arah penelitian setelah kegiatan selesai antara lain melaksanakan kewajiban bersama untuk kepentingan masyarakat. Melaksanakan kewajiban bersama dapat dilaksanakan melalui komunikasi antar budaya dan akan menjadi efektif untuk tujuan adaptasi social. Apabila dilakukan bersama yaitu saling memahami perbedaan antara sesama petani kelapa sawit maka akan muncul ikatan bersama dan saling memerlukan. Mengakui dan menghormati hak tanah orang lain, simpati terhadap pekerjaan etnis lain, bantu membantu dalam pekerjaan, menghormati tradisi masyarakat setempat patut dipelihara dan dibanggakan masyarakat. Akhirnya, adanya kepastian, keadilan, dan kedaulatan tenurial di masyarakat, ekonomi rakyat meningkat dan konflik horizontal di antara pemilik lahan berkurang

BAB IV.

MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi Pemerintah.

Pemerintah Daerah selama ini masih menghadapi banyak kendala dalam upaya menangani konflik horizontal. Kendala itu antara lain disebabkan terbatasnya sumber biaya dan tenaga profesional yang dimiliki pemerintah daerah untuk kepentingan layanan dalam bentuk komunikasi antar etnis, serta kesadaran maupun peranserta masyarakat relatif masih rendah. Dilakukannya penelitian ini, di samping dapat meringankan beban pemerintah daerah, dapat digunakan sebagai terobosan dalam menyelesaikan konflik horizontal di masyarakat. Selain itu, dapat memberikan rekomendasi untuk kebijakan pembangunan bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hilir.

2. Bagi Masyarakat.

Penelitian yang menekankan prakarsa masyarakat sebagai basis utama dari upaya-upaya komunikasi antar budaya yaitu saling menghormati dalam masyarakat yang multi kultur. Untuk itu, masyarakat dapat meningkatkan perbaikan pelayanan berbagai aspek untuk kepentingan pemecahan masalah-masalah serupa yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Di samping itu, penelitian ini akan menggugah kesadaran masyarakat untuk lebih peduli terhadap masalah-masalah sosial sehingga tidak terjadi konflik horizontal.

Selain yang dikemukakan di atas, manfaat penelitian adalah secara nyata dan bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa sebagai; (1) Publikasi Jurnal Terakreditasi Nasional atau Internasional dan; (2) Paten.

BAB V.

METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian kualitatif dengan penyajian analisis secara deskriptif. Suharsimi Arikunto (1995) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksud mengumpulkan informasi untuk menguji hipotesis tertentu, dan juga hanya menggambarkan apa adanya. Di dalam penelitian deskriptif tidak diperlukan administrasi dan pengontrolan terhadap kelakuan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hilir yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara sering terjadi konflik antara pengusaha perkebunan dengan petani perkebunan kelapa sawit dan atau sesama petani perkebunan kelapa sawit disebabkan penyerobotan tanah, penguasaan hak dengan menggunakan kekerasan, dan juga adanya surat-surat kepemilikan yang ganda.

3. Obyek dan Subyek Penelitian

3.1 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang bekerja sebagai petani kelapa sawit, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat di tingkat kecamatan. Penentuan informan berdasarkan informan kunci dan bola salju berguling sampai data-data yang diperlukan

sudah lengkap. Informan yang terpilih memiliki kemampuan untuk memberikan pendapat (opini) dan menjawab pertanyaan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.2 Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah informasi tentang fungsi komunikasi antar budaya dalam mengurangi konflik horizontal yang menyebabkan stereotip atau prasangka sosial dalam masyarakat tani.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi ialah pemilihan, pengubahan, pencatatan, pengkodean dan in situ untuk tujuan empiris. Pemilihan meliputi pengamatan ilmiah yang memfokuskan pengamatan secara sengaja atau tidak sengaja, sehingga mempengaruhi apa yang diamati, apa yang dicatat, dan kesimpulan apa yang diambil. Pengubahan berarti observasi tidak hanya dilakukan secara pasti. Peneliti boleh berperilaku atau suasana tanpa mengganggu kewajaran. Pencatatan adalah suatu upaya merekam peristiwa dengan menggunakan pencatatan lapangan, system kategori, dan metode-metode lainnya.

Observasi langsung dilaksanakan dengan berpedoman kepada sejumlah acuan pengamatan yang telah disiapkan terlebih dahulu dalam bentuk pedoman observasi. Hal-hal yang diamati secara langsung oleh peneliti selama penelitian lapangan adalah yang berhubungan dengan topik penelitian.

Observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Dengan observasi, peneliti juga dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan

dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian, sehingga memungkinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2004).

Data yang dikumpulkan lebih difokuskan pada data yang dibutuhkan untuk perencanaan dalam komunikasi antar budaya dalam menanggulangi konflik horizontal penduduk lokal terhadap perkembangan sosial ekonomi. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan jalan mengumpulkan langsung (primer dan sekunder), FGD dengan masyarakat lokal dan pendatang, tokoh masyarakat serta *stakeholders* terkait.

b. Wawancara

Wawancara, merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara di mana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif (Bungin, 2003:67).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung melalui tatap muka terhadap informan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak komunikasi lintas etnis migran penduduk terhadap peningkatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Informasi yang lebih luas dapat diperoleh, interpretasi serta pembicaraan responden dapat meningkatkan intensitas kepercayaan responden terhadap peneliti.

c. Sosialisasi/Penyuluhan FGD

Peneliti melakukan Sosialisasi / Penyuluhan terhadap kelompok petani perkebunan sawit. Melalui penyuluhan dan sosialisasi (FGD) tentang komunikasi antar budaya petani kebun sawit

akan memahami pentingnya harmonisasi dalam bermasyarakat. Melalui sosialisasi dan penyuluhan di lapangan akan terjadi perubahan sikap yaitu saling menghormati dan menghindarkan terjadinya konflik sosial.

e. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyalin data-data atau arsip yang tersedia pada interview atau instansi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingannya (Moleong, 2004:216).

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan tidak digunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yakni teknik analisis yang dilakukan melalui proses pemikiran logis, baik secara induktif, deduktif, analogis komparatif. Maksudnya, dalam penelitian ini peneliti memulai dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum (Bungin,2003:68).

Data yang diperoleh selama penelitian dikompilasi ke dalam tabel dan dianalisis sekaligus dibahas secara deskriptif untuk menghasilkan rumusan yang dapat dijadikan sebagai hasil akhir untuk rekomendasi tentang arah kebijakan Funfi Komunikasi Antar Budaya Dalam mengurangi Konflik Horizontal di Kabupaten Rokan Hilir.

6. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif, maka dalam menganalisis data yang berhasil dikumpulkan tidak digunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif yakni teknik analisis yang dilakukan melalui proses pemikiran logis, baik secara induktif, deduktif, analogis maupun komparatif. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. *Perpanjangan Keikutsertaan*

Perpanjangan keikutsertaan juga menuntut peneliti agar dapat terjun langsung ke dalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin dapat mengotori data, selain itu perpanjangan keikutsertaan juga dimaksudkan untuk membangun para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. (Moloeng,1994)

b. *Triangulasi*

Triangulasi sebagai tehnik kualitatif yang digunakan sebagai pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang memperoleh waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton), dengan jalan sebagai berikut:

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. (1)
Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan

secara pribadi; (2) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu; (3) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada, maupun orang pemerintahan; dan (4) Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang berkaitan. (Moleong,2004).

BAB VI.

PROFIL ROKAN HILIR

Kabupaten Rokan Hilir dengan Ibu Kota Bagan Siapi-api terletak disebelah Timur Sungai Rokan. Tempat ini merupakan sebuah perkampungan ikan yang berada pada pantai timur pulau Sumatera. Hasil produksinya seperti Ikan Asin dan Udang diekspor keseluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kota lain yang berperan penting di kabupaten ini adalah Bagan Batu yaitu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Rokan Hilir dibentuk dari kenegerian, yaitu negeri Kubu, Bangko Dan Tanah Putih. Negeri-negeri tersebut di pimpin oleh Kepala Negeri yang bertanggung jawab kepada Sultan Kerajaan Siak. Distrik pertama didirikan Belanda di Tanah Putih pada saat menduduki daerah ini tahun 1890. Setelah Bagansiapiapi yang dibuka oleh pemukim-pemukim Cina berkembang pesat, maka Belanda memindahkan Pemerintah Kontrolreulnya ke Kota Bagansiapiapi pada tahun 1901.

Bagansiapi-api semakin berkembang setelah Belanda membangun pelabuhan modern dan terlengkap di kota Bagansiapiapi guna mengimbangi pelabuhan lainnya di Selat Malaka hingga Perang Dunia Pertama usai. Setelah Indonesia merdeka, Rokan Hilir digabungkan ke dalam Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Pada tanggal 4 oktober 1999 ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai kabupaten baru di Propinsi Riau sesuai dengan undang-undang nomor 53 tahun 1999, sebagai ibukota ditetapkan di Bagansiapiapi.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki luas wilayah 8.881 , 59 km² atau 888. 159 hektar, terletak pada koordinat 1014' sampai 2045' Lintang Utara & 100017' hingga 101021' Bujur Timur dengan Batas Kabupaten Rokan Hilir sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai

Kabupaten Rokan Hilir dengan ibukota Bagan Siapi-api terletak di sebelah timur Sungai Rokan. Tempat ini merupakan sebuah perkampungan ikan yang berada pada pantai timur pulau Sumatera. Hasil produksinya seperti ikan asin dan udang diekspor ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Kota lain yang berperan penting di kabupaten ini adalah Bagan Batu yaitu berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki iklim tropis dengan jumlah curah hujan 1.808,5 mm/tahun dan temperatur udaranya berkisar pada 24°-32°C. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Februari s/d bulan Agustus. Sementara musim hujan terjadi pada bulan September s/d Januari dengan jumlah rata-rata hujan 69 hari, curah hujan tertinggi adalah di Kecamatan Bangko, yaitu 2.710 mm/tahun dan curah hujan terendah di Kecamatan Tanah Putih dengan jumlah 1.443,8 mm/tahun.

Lebih dari 50% ekonomi kabupaten berasal dari sector pertanian khususnya dari bagian sektor perkebunan, perikanan, tanaman pangan dan kehutanan. Sektor lain yang memberikan kontribusi besar adalah perdagangan, hotel dan restoran, khususnya pada sektor perdagangan. Sejak berlakunya otonomi daerah, Kabupaten Rokan Hilir telah mencoba untuk mempersiapkan sarana dan infrastruktur baru seperti: transportasi darat, transportasi laut, listrik, fasilitas kesehatan, air bersih dan lain-lain.

Memasuki abad-21, kehidupan sosial ekonomi wilayah dan penduduk Bagansiapi-api telah bergeser menjadi 2 strata perekonomian yaitu strata ekonomi masyarakat ekonomi modern meliputi industri minyak, kehutanan dan perkebunan sawit dan strata ekonomi masyarakat desa tradisional meliputi komoditi tradisional, karet dan perikanan serta sarang burung wallet.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999, yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1999, Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 sebagai Kabupaten Baru dengan pusat pemerintahan di Bagansiapi-api. Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Sumatera dengan luas wilayah \pm 888,59 km, yang terdiri dari daratan, pulau-pulau dan lautan. Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2006 membawahi tiga belas kecamatan, meliputi Kecamatan Bangko, Kecamatan Kubu, Kecamatan Tanah Putih, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Rimba Melintang, Kecamatan Bagan Sinembah, Kecamatan Pujud, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kecamatan Sinaboi, Kecamatan Simpang Kanan, Kecamatan Bangko Pusako, Kecamatan Batu Hampar, Kecamatan Rantau Kopar.

Pertumbuhan ekonomi tercermin dengan munculnya bangunan-bangunan bertingkat dan tertutup sebagai sarang burung wallet, membawa berkah baru bisnis sarang burung wallet di kota Bagansiapi-api dan beberapa kota di Rokan Hilir semakin marak. Perdagangan/Pengusaha wallet baik warga setempat maupun pemodal dari luar daerah membangun gedung tinggi bertingkat sebagai rumah sarang burung wallet, termasuk berdirinya beberapa hotel seperti Hotel Lion, Hotel Kades Bagan, Hotel Bagan, Hotel Mahera, Hotel Horison, Hotel Indah, Hotel Paradise dan Wisma-wisma serta penginapan tumbuh berkembang sebagai barometer pertumbuhan ekonomi

yang cepat dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir secara sadar dan eksplisit berkomitmen memberi perhatian penuh pada pengembangan perekonomian Rokan Hilir.

BAB VII

PEMBAHASAN

1. Karakteristik Responden.

Karakteristik responden merupakan identitas ciri responden yang diambil datanya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan keadaan responden di lapangan. Karakteristik responden menyangkut usia, pendidikan, daerah asal, dan status dalam keluarga di daerah asal.

Pendidikan merupakan salah satu variabel sosial yang penting, khususnya yang akan berhubungan dengan jenis pekerjaan dan pengalaman tentang cara-cara beradaptasi dengan kondisi pada daerah tujuan khususnya komunitas lokal masyarakat Melayu di Rokan Hilir. Pendidikan dapat membantu seseorang dalam memperoleh lapangan pekerjaan setelah ia melakukan perpindahan ke daerah Rokan Hilir. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pihak penyedia lapangan pekerjaan akan mempermudah seseorang memasuki lapangan pekerjaan. Dalam perkembangan teknologi modern, apabila perpindahan seseorang dari daerah asal ke tempat yang lebih maju dari daerah asalnya hanya dengan bekal pendidikan rendah tanpa adanya ketrampilan lain, akan sulit menghadapi persaingan dengan mereka yang memiliki tingkat pendidikan tinggi ditambah dengan penguasaan teknologi. Untuk mengetahui bagaimana pendidikan responden penelitian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Pendidikan Responden

PENDIDIKAN FORMAL TERTINGGI		Jumlah	Persentase
	Sekolah Dasar	56	34.25
	SLTP	30	18.29
	SLTA	59	35.98
	Diploma	8	4.88
	Sarjana	8	4.88
	Magister (S2)	0	0.00
	Doktor (S3)	0	0.00
	Tidak Menjawab	3	1.83
JUMLAH		164	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012.

Berdasarkan tabel 1 di atas diperoleh suatu gambaran bahwa masih ada responden mempunyai latar belakang pendidikan formal yang setingkat dengan Sekolah Dasar pada waktu melakukan perpindahan ke Rokan Hilir sebagai tempat tinggal permanen. Dengan latar belakang pendidikan formal yang sangat mendasar, responden tentu akan sulit bersaing dengan masyarakat lain yang memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi. Dapat digambarkan bahwa para responden hanya mengandalkan pada kekuatan fisik atau pemilikan modal untuk melakukan usaha atau jasa-jasa lainnya.

Pendidikan formal responden pada umumnya adalah setara dengan SMU/SMK yaitu 35.98%; sedangkan pendidikan formal responden yang setara dengan Sarjana hanya berjumlah 8 orang atau 4.88%, dan tidak ada petani kelapa sawit memiliki latar belakang pendidikan yang setara dengan Magister dan Doktor. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tim peneliti kepada salah seorang responden mengatakan;

“Saya kalah bersaing dengan teman-teman yang mempunyai latar belakang pendidikan formal sesama Sarjana, karena Ijazah Sarjana yang saya miliki tidak relevan dengan kebutuhan atau lowongan yang tersedia. Akibatnya, pada saat ini saya tidak mau lagi melamar pekerjaan di perusahaan maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan berusaha ke bidang yang lain yaitu menciptakan lapangan pekerjaan dengan modal

sendiri sebagai petani kelapa sawit. Ternyata, setelah hal tersebut saya lakukan dan berhasil, sekarang saya banyak juga menggunakan tenaga kerja pendidikan formalnya SMTA ke atas, yang juga tidak pernah diterima waktu melamar di perusahaan atau PNS sesuai dengan bidang ilmu yang dimilikinya”. (wawancara: Suyoto, 2 September 2012)

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan formal yang tinggi tidak menjadi jaminan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, apabila ijazah tersebut tidak ada kaitannya dengan lowongan yang tersedia. Di samping itu, dalam perkembangan teknologi informasi saat ini, seseorang tidak hanya menguasai bidang ilmu secara teoritis saja, tetapi harus ditunjang dengan keterampilan pendukung lainnya antara lain penguasaan dibidang komputer, dan bahasa Inggris. Hal itu diungkapkan oleh Ridwan, SH dalam wawancara yang dilakukan tim peneliti pada tanggal 2 September 2012 di Bagan Batu Kecamatan bagan Sinembah sebagai berikut;

“Pendidikan saya Sarjana Hukum, tetapi karena tidak bisa mengoperasikan komputer dan juga tidak menguasai bahasa Inggris, saya selalu kalah di akhir dari wawancara pada penerimaan PNS. Saya selalu gagal, sekarang ijazah saya simpan di dalam lemari dan hingga saat ini tidak pernah lagi memasukkan lamaran pekerjaan ke pemerintahan yang membutuhkan tenaga kerja. Pengorbanan orangtua saya sia-sia, dan demi anak-anak dan keluarga, saya membuka lading perkebunan kelapa sawit setelah beerakhirnya pekerjaan saya sebagai anggota DPRD di Rokan Hilir yang tidak membutuhkan pendidikan formal yang setara dengan Sarjana”.

Daerah asal responden merupakan daerah di luar Kabupaten Rokan Hilir. Di samping itu, ada daerah antar kecamatan dalam kabupaten Rokan Hilir. Adapun daerah asal responden meliputi berbagai daerah yang berada di sekitar Kabupaten Bengkalis dan daerah yang jauh

dari Kabupaten Bengkalis bahkan melintasi antar provinsi dari seluruh Indonesia. Secara khusus daerah asal responden dapat dibagi menjadi beberapa bagian seperti yang tertulis dalam tabel berikut;

Tabel 2. Asal etnis responden

		JUMLAH	PERSENTASE
ASAL ETNIS	BATAK	22	13.41
	JAWA	85	51.83
	MINANGKABAU	3	1.83
	MELAYU	49	29.88
	TIONHOA	1	0.61
	DLL	3	1.83
	TIDAK MENJAWAB	1	0.61
	Jumlah	164	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012.

Berdasarkan tabel 2 dapat diperoleh keterangan bahwa responden yang paling banyak melakukan migrasi ke daerah Kabupaten Rokan Hilir berasal dari etnis Jawa berjumlah 51.83%; dan yang paling sedikit asal etnis responden ialah Tionghoa. Rokan Hilir yang pada awalnya merupakan salah satu daerah transmigrasi yaitu di Kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan Bangko Pusaka, mempermudah responden untuk melakukan migrasi. Di samping itu, selain Melayu berjumlah 29.88% merupakan penduduk lokal pada umumnya tidak begitu banyak membutuhkan biaya apabila responden melakukan kunjungan ke daerah asalnya dari kabupaten lainnya di Riau.

Responden yang berasal dari Sumatera Utara menempati urutan yang ketiga yaitu 13.41% merupakan etnis Batak. Lancarnya transportasi dari Sumatera Utara ke Riau sebagai batas langsung, dan khususnya ke Kabupaten Rokan Hilir yang diharapkan dapat menjanjikan sosial ekonomi mereka lebih baik adalah salah satu faktor pendorong melakukan perpindahan

penduduk. Menurut salah seorang responden yang diwawancarai tim peneliti tanggal 3 September 2012 yaitu bapak Saragi yang juga menjadai Penghulu Pasir Putih Kecamatan Bagan Sinembah mengatakan;

“Masyarakat Sumatera Utara sejak dari dahulu telah melakukan migrasi ke daerah Rokan Hilir khususnya daerah Kecamatan Bagan Sinembah. Mendengar informasi Riau kaya dan khususnya Rokan Hilir memiliki kekayaan alam yang melimpah saya tertarik untuk tinggal dan hidup di daerah ini. Sejak awal saya meninggalkan daerah saya Kota Pematang Siantar dengan tekad dan semangat pribadi tanpa ada ajakan orang lain. Sekarang sosial ekonomi saya lebih baik apabila dibandingkan dengan semasa tinggal di kampung. Saya tidak pernah melamar menjadi pegawai negeri, karena saya lebih suka mengatur diri sendiri. Setiap tahun saya pulang ke kampung paling tidak sekali dalam setahun, untuk melakukan komunikasi dan hubungan kekerabatan dengan saudara-saudara yang tinggal di kampung. Masyarakat Sumatera Utara yang lainnya pun sama seperti saya, karena tidak ada batas lagi antara Rokan Hilir ke daerah Sumatera Utara dibidang transportasi”.

Pernyataan di atas mengungkapkan bahwa Kabupaten Rokan Hilir terbuka terhadap masyarakat luar yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Apabila bapak Saragi pindah ke Rokan Hilir atas usahanya sendiri, dan lain halnya dengan bapak Kodir salah seorang wiraswasta yang berasal dari Sumatera Barat. Dalam wawancara tanggal 3 September 2012 di Kecamatan Pinggir Bangko Pusaka menyatakan:

“Awalnya saya merantau karena dibawa kakak sepupu dari Padang. Karena tidak mempunyai pendidikan formal yang memadai, maka setiap melamar pekerjaan selalu ditolak

dan hampir frustrasi. Namun, berkat pertolongan dari salah seorang teman kakak, saya diberikan modal untuk berusaha. Usaha itu maju dan berkembang sehingga saya sudah mampu memiliki dua unit kendaraan bermotor roda empat yang digunakan mengangkut buah kelapa sawit, satu unit rumah, dan sebidang kebun kelapa sawit. Saya berhasil karena mampu melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat di tempat tinggal saya. Mereka adalah patner saya karena saling membutuhkan”.

Dari dua kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa responden bermigrasi ke Kabupaten Rokan Hilir dengan berbagai alasan. Kenekatan seseorang dengan usaha dan kerja keras dapat berhasil dengan baik. Kesabaran dan keuletan dalam menghadapi masalah juga membawa migran berhasil dibidang sosial ekonominya. Namun, tidak semua migrasi berhasil setelah ia tinggal di Rokan Hilir, karena tergantung pada petani kelapa sawit dalam beradaptasi dengan lingkungan, tingkat pendidikan atau keterampilan yang dimiliki serta kehendak sang pencipta.

Tidak semua suku atau etnis yang ada di Kabupaten Rokan Hilir tinggal secara serentak dan jumlahnya pun setiap tahun tidak sama. Setiap tahun pasti ada yang melakukan perpindahan ke daerah itu sebagai tempat tinggal permanen, dengan berbagai alasan antara lain seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Maka, untuk mengetahui berapa lamanya migran tinggal di Kabupaten Rokasn Hilir dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3: Lama tinggal responden

Lama Tinggal Ditempat		Jumlah Responden	Persentase
		1 – 2 TH	2
	2,1 4 TH	7	4.27
	4,1 - 6 TH	9	5.49
	6,1 - 8 TH	12	7.32
	8,1 - 10 TH	15	9.15
	> 10 TH	112	68.29
	Tidak Menjawab	7	4.27
Jumlah		164	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012.

Berdasarkan tabel 3, diperoleh keterangan bahwa lama tinggal responden sudah lebih 15 tahun berjumlah 112 orang atau 68.29% dan didominasi responden yang berasal dari etnis Batak. Sedangkan responden yang lama tinggal antara 8,1 tahun s/d.10 tahun berjumlah 9.15% atau berjumlah 15 orang didominasi oleh etnis Minangkabau. Responden yang sudah tinggal di Kabupaten Rokan Hilir yang tidak member jawaban 4.27%.

Adanya perbedaan jumlah responden dengan daerah asal yang melakukan migrasi ke Kabupaten Rokan Hilir tidak sama seperti yang tertera pada tabel 3, disebabkan beberapa hal yaitu; (1) perpindahan dari daerah asal bukan hanya didominasi satu etnis, namun adakalanya etnis Batak melakukan migrasi dari Sumatera Barat ke daerah Rokan Hilir; (2) Perpindahan antar Kabupaten maupun Kecamatan terdiri dari berbagai etnis namun berasal daerah yang sama.

Dari sisi faktor daerah tujuan (penarik) yang paling dominan mempengaruhi adalah peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dengan penghasilan yang tinggi dibandingkan

dari daerah asal. Pekerjaan yang diharapkan tersebut pada umumnya bergantung kepada peluang kerja yang disediakan oleh perusahaan besar seperti di Bagan Siapi-api, peluang kerja sektor jasa seperti di Bagan Sinembah, dan peluang perdagangan di daerah Bagan Siapi-api bagi mereka-mereka yang dapat menangkap peluang tersebut. Untuk mengetahui bagaimana pekerjaan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 : Jenis pekerjaan responden

Pekerjaan		JUMLAH	PERSENTASE
	PNS	5	3.05
TNI/POLRI	1	0.61	
Pegawai Swasta	22	13.41	
Petani	117	71.34	
Pedagang	6	3.66	
Lain-Lain	7	4.27	
Yg Tdk Menjawab	6	3.66	
JUMLAH		164	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4, diperoleh keterangan bahwa responden ada yang bekerja sebagai PNS berjumlah 5 orang atau 3.05; bekerja sebagai TNI/Polri berjumlah 1 orang atau 0.61%. Dapat dikemukakan bahwa pada umumnya responden bekerja hanya sebagai petani kelapa sawit, sedangkan yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan TNI/Polri, melakukan pekerjaan sebagai petani kelapa sawit dengan menggunakan jasa orang lain supaya tidak terganggu dengan tugas-tugas pokoknya. Bekerja sebagai TNI/Polri dan sebagai PNS ketiga instansi tersebut penghasilan mereka sudah jelas dapat diukur sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemerintah. Namun responden yang bekerja sebagai pedagang, wiraswasta, bertani

dan lain-lainnya tidak dapat ditentukan berapa jumlah penghasilannya setiap bulan. Penghasilan mereka adalah tergantung pada hasil yang diperoleh setiap bulannya.

Dengan keterbatasan penghasilan yang telah ditetapkan pemerintah setiap bulan, bukan berarti responden yang berasal ketiga instansi di atas tidak bisa membangun atau membeli keperluan hidup yang lebih layak. Responden juga melakukan pekerjaan sampingan yaitu memiliki kebun, memiliki usaha dagang dan sebagainya sehingga mereka mampu untuk menyekolahkan anak, membangun rumah dan sebagainya.

Tentu saja mereka yang berhasil adalah yang mempunyai keterampilan yang dapat diandalkan dibidang tersebut. Pada umumnya orang-orang ini mempunyai tingkat keberhasilan yang tinggi dalam usahanya. Dampak dari keberhasilan ini menambah faktor penarik dari mereka yang bersifat kekeluargaan. Dengan demikian, faktor keberhasilan suatu keluarga juga menyebabkan meningkatnya tingkat migrasi di pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini adanya peluang kerja dan usaha yang dijanjikan oleh mereka terhadap sanak famili di daerah asal. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah pendapatan rata-rata setiap bulan pada warga petani kelapa sawit dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 5. Jumlah Pendapatan Responden

		Jumlah	Persentase
Rata2 pendapatan setiap bulan	<Rp. 2.000.000.-	72	43.90
	Rp. 2.001.000-3.000.000	29	17.68
	Rp. 3.001.000-4.000.000	14	8.54
	Rp. 4.001.000-5.000.000	17	10.37
	> Rp. 5.000.000	14	8.54
	Tidak Menjawab	18	10.98
JUMLAH		164	100

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2012

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 5, diperoleh keterangan bahwa responden pada umumnya mempunyai pendapatan menetap rata-rata kurang dari Rp.2.000.000.- berjumlah 72 orang atau 43.90%. Sebagian kecil ada responden mempunyai penghasilan yang di atas Rp.5.000.000.- yaitu berjumlah 14 orang atau 8.14%. Minimnya pendapatan responden disebabkan berbagai hal antara lain kegagalan dalam berusaha, kegagalan dalam bertani dan penghasilan yang sangat menim dari tempat responden bekerja, di samping keterbatasan luas lahan kebun kelapa sawit yang diolah repsonden.

B. KONFLIK HORIZONTAL

Dari hasil pengumpulan data lapangan dan wawancara yang dilakukan tim peneliti dengan responden diperlukan sinergis antara pemerintah daerah, pelaku bisnis dan masyarakat yang sangat berperan dalam pengentasan konflik. Karena akar konflik disebabkan tidak adanya perlindungan terhadap asset penghidupan yang dapat mengancam mata pencaharian masyarakat khususnya petani kebun kelapa sawit. Selain itu, minimnya kesempatan kerja, terbatasnya akses informasi, permodalan dan sumberdaya lainnya yang ditengarai sebagai penyebab akar konflik horizontal.

Untuk dapat mensinergikan masyarakat tani yang majemuk, perlu dilakukan pola pengaturan dan penjagaan keteraturan sosial sehingga bisa berjalan secara tertib, produktif, dan berkesinambungan. Kontrol sosial juga berfungsi sebagai sarana usaha untuk mempengaruhi dan menundukkan perilaku individu pada norma-norma masyarakat. Dengan menciptakan sinergisitas pada gilirannya diharapkan akan bermuara pada penguatan kemampuan pemeliharaan keamanan dan menghindarkan konflik di masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu menyadari bahwa akan mengalami kegagalan dalam membangun masyarakatnya apabila masyarakatnya tidak tertib. Untuk itu, permasalahan tanah harus diwaspadai karena berpotensi menimbulkan konflik antara petani dengan petani, warga dengan pengusaha bahkan warga dan aparat keamanan. Kasus-kasus penyelesaian tanah berkaitan dengan alas hak kepemilikan tanah yang tidak jelas, tata batas yang tidak jelas, serta ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah daerah dan lain-lainnya. Banyak lahan sengketa memperoleh sertifikat dan diperparah dengan adanya pendirian bangunan dalam berbagai ukuran di lahan yang menjadi obyek sengketa.

Proses proletarisasi di pedesaan Rokan Hilir terus berlangsung. Masyarakat desa yang mayoritas petani, yang tadinya memiliki tanah mulai kehilangan sumber penghasilannya karena tanah tak lagi mereka kuasai. Masyarakat petani kebun sawit menjadi miskin, disebabkan tanah dalam skala luas dikuasai oleh perusahaan besar. Terjadinya proletarisasi masyarakat pedesaan, konflik agraria bakal makin terus terjadi. Konflik akan semakin tinggi dan pasti akan mendatangkan korban. Tanah yang dimiliki petani sudah semakin sempit, sementara kebutuhan petani semakin meningkat. Pemerintah daerah kadangkala berpikir jangka pendek dengan lebih memilih memberikan izin kepada perusahaan daripada berpihak kepada masyarakat tani. Ketidakberpihakan itu menimbulkan konflik lahan. Maka, perlu adanya memberikan hak-hak tenurial masyarakat adat dan harus ada kepastian, keadilan dan kedaulatan tenurial pada masyarakat tani serta merealisasikan pembaruan agraria.

Maraknya konflik pertanahan tidak terlepas pula dari politik pertanahan yang ada. Konflik pertanahan muncul ketika hak menguasai negara (HMN) berbenturan dengan hak asasi (HAM) warga negara, khususnya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat) maka solusinya adalah sinkronisasi HMN dan HAM. Politik agraria sudah seharusnya berorientasi

pada kesejahteraan rakyat. Politik hukum agraria harus menjamin kepastian hukum yang berkeadilan. Hal itu sesuai dengan pokok pemikiran Bernhard Limbong (2012) dalam bukunya Konflik, Pertanahan, Penanganan dan Penyelesaian menyatakan dua hal dalam hubungan dengan konflik pertanahan. Dua hal tersebut lebih bersifat antisipatoris dan preventif, yakni pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan pertanahan yang lebih responsif dan mendesak dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan.

Pemerintah daerah Rokan Hilir perlu komitmen menyikapi kasus-kasus perampasan lahan. Konflik lahan perlu serius oleh pemerintah dan penegak hukum, karena persoalan lahan yang berujung pada bentrok adalah penyakit yang diwariskan sejak zaman orde baru di mana sistem pemerintahan dulu adalah menganup *top down*. Artinya pemerintah pusat memberikan izin kepada perusahaan-perusahaan tanpa terlebih dahulu melihat persoalan di bawah. Konflik lahan adalah bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan jika konflik lahan secara horizontal maupun vertical tidak selesai akan memperlambat rencana tata ruang.

Dari hasil wawancara dan analisa lebih lanjut terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan tim peneliti, beberapa penyebab konflik di Rokan Hilir bagi petani kelapa sawit disebabkan;

1. Tumpang tindih lahan memicu terjadinya konflik. Tak sedikit kasus tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit yang meruncing dan mengakibatkan timbul kerugian moril dan material bahkan terjadinya korban jiwa. Salah satu contoh adalah pembakaran salah satu pos di Kepenghuluan Air Hitam, Kecamatan Pujud. Selain itu juga jual beli tanah pihak ketiga karena prosedur jual beli tanah yang tidak jelas bahkan perampasan. Adanya oknum kepenghulan menjual lahan hutan kepad apengusaha. Salah satunya di

Kpenghuluan Sungai Daun, Kecamatan Pasir Limau Kapas yaitu terjadi penebangan hutan bakau secara besar-besaran.

2. Batas dengan tetangga sesama pemilik kebun kelapa sawit sering menjadi salah satu pemicu munculnya konflik bagi sesama petani, disebabkan batas-batas kebun yang dimiliki petani sebahagian besar tidak dikelilingi parit, dan juga tidak ada patok batas antara sesama pemilik kebun sawit. Konflik perbatasan dengan tetangga terjadi apabila buah kelapa sawit yang dimiliki tetangga hasilnya bagus, sedangkan yang dimiliki petani sawit lainnya kurang bagus. Konflik perbatasan dengan tetangga sebahagian karena kurangnya kesadaran petani untuk mengurus langsung surat-surat resmi yang dimiliki petani sawit pada instansi pemerintahan, sehingga bertahun-tahun ada petani kelapa sawit tidak mengantongi surat kepemilikan dari pihak pemerintah. Tanah yang dimiliki awalnya berdasarkan kepercayaan dari pihak pembeli, kemudian timbul permasalahan bahwa tanah adalah milik mereka bukan milik dari yang mengolah tanah setelah lahan kosong tersebut berhasil diolah dan sudah mendatangkan hasil sawit yang banyak.
3. Hilangnya buah sawit yang akan dipanen juga sering menimbulkan konflik karena saling mencurigai antara sesama petani kelapa sawit. Adanya saling mencurigai di antara sesama petani kelapa sawit, kadang-kadang terjadi saling intip sesama pemilik kebun sawit untuk mengetahui siapa yang melakukan panen sawit di kebun yang mereka miliki.
4. Responden penelitian yang bekerja sebagai petani kelapa sawit konflik horizontal terjadi pada sesama petani kelapa sawit, namun sebahagian terjadi disebabkan adanya pihak perusahaan yang mendatangi petani kelapa sawit agar mereka bersedia menjual kebun maupun tanah petani dengan harga yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Juga terjadi dalam kelompok petani menjadi dua kubu, sebahagian tidak mendukung apa yang

diinginkan pihak perusahaan dan sebahagian lagi mendukung apa yang diminta perusahaan. Dampaknya bukan lagi konflik antara petani dengan pihak perusahaan, melainkan menjurus pada konflik yang bersifat horizontal.

Dari hasil pengumpulan data lapangan dapat dikemukakan beberapa contoh sengketa tanah yang ada di lokasi penelitian yaitu;

Tabel 6: Sengketa tanah di Rokan Hilir

No	Lokasi sengketa tanah	Tahun Kejadian	Pokok Permasalahan	Luas tanah sengketa	Akibat sengketa
1	Kepenghuluan Kota Paret Kecamatan Simpang Kanan / Sengketa tanah antara Timbang Sianipar dengan masyarakat (Rizal Cs)	1992	<ul style="list-style-type: none"> -Salah seorang ahli waris pimpinan Pepabri Labuhan Batu yang memiliki tanah secara kolektif di Kota Paret yang bernama Supriadi menjual tanah milik Pepabri kepada Letkol (purn) Timbang Sianipar seluas lebih kurang 200 ha -Setelah membeli tanah dimaksud di atas Letkol (Purn) Timbang Sianipar merampas tanah hak milik masyarakat yang berdampiran dengan tanah milik Pepabri tersebut seluas lebih kurang 300 ha yang memicu terjadinya sengketa -Tanah Pepabri yang diperjual belikan oleh Supriadi (200 ha) tidka pernah diketahui oleh anggota Pepabri lainnya, selanjutnya beberapa orang anggota Pepabri membuat pengaduan 	500 ha	<ul style="list-style-type: none"> -1 unit kantor Pos Polisi dibakar - sekitar lebih kurang 8 orang masyarakat ditangkap dan diadili -Tanah masyarakat dikuasai oleh Timbang Sianipar sampai saat ini - Warga masyarakat yang bernama Rizal depre-si dan telah meninggal dunia

			tetapi tidak pernah mendapat respon		
2	Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Bagan Sinembah / Sengketa tanah Suku Hamba Raja Kubu dengan PT Ivomas	2003	-Warga suku Hamba Raja mengklaim bahwa tanah kebun kelapa sawit milik PT Ivomas di Kecamatan Bagan Sinembah adalah tanah milik hak ulayat suku hamba raja -Warga menuntut agar PT Ivomas mengembalikan tanah hak ulayat milik suku hamba raja	Ribuan ha	-Terjadi bentrok antara masyarakat suku hamba raja yang berjumlah kurang lebih 15.000 orang dengan ribuan karyawan PT Ivomas -Beberapa orang masyarakat luka akibat bentrok
3	Dusun ampaian Rotan Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah / sengketa masyarakat dengan Timbang Sianipar	2003	-Tahun 1994 kurang lebih 116 kk masyarakat bersengketa dengan Santoso (Kwan Pok Keng), dan pemda Bengkalis tidak mengakui keberadaan kepemilikan tanah Santoso (Kwan Pok Keng). -Timbang Sianipar menggugat Santoso di pengadilan Negeri Dumai (diduga pengadilan rekayasa) tanpa dihadiri oleh masyarakat yang dimenangkan oleh Timbang Sianipar. Melalui keputusan Pengadilan negeri Dumai dimaksud menguasai ribuan hektar lebih tanah milik masyarakat, sementara keputusan pengadilan tersebut hanya sleuas 624 ha -Masyarakat melalui tim independent Legal Audit kasus Amapaian Rotan yang dibentuk oleh Gubernur Riau telah mengadakan Ketua Pengadilan negeri Dumai	Ribuan ha	-20 unit rumah masyarakat dibakar dan salah seorang bayi berusia 1,5 tahun yang bernama Indah Pratiwi ikut terbakar dan luka serius -Salah seorang warga bernama Ibrahim Sitmpul terluka akibat bentrok masyarakat dengan preman suruhan Timbang Sianipar -Ribuan hektar tanah milik masyarakat dikuasai secara paksa oleh Timbang Sianipar -Banyak masyarakat yang depresi -Masih terjadi penyerobotan

			ke Komisi Yudisial dan selanjutnya ketua pengadilan diperiksa dan dipindahkan ke Sumatera Barat, namun surat keputusan memenangkan Timbang Sianipar tidak dibatalkan		sampai saat ini
4	Kepenghuluan Pasir Limau Kapas dan Kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas / Sengke-ta tanah antara masyarakat Pasir Limau Kapas dan Panipahan Laut dengan Kelom-pok Tani KSK dan PTP IV Sumut	2008	-Berawal dari sengketa tapal batas antara Sumatera Utara dengan Riau yang tidak kunjung selesai -Kelompok Tani KSK Teluk Beting Sumatera Utara dan PTPN IV Sumatera Utara mengklaim sebahagian wila-yah Kepenguluan Pasir Limau Kapas dan Panipahan Laut masuk dalam izin lokasi tanah yang mereka miliki	Ratusa n ha	-1(satu) unit alat berat milik Kelompok Tani KSK dibakar massa -Beberapa orang masyarakat Pasir Limau Kapas ditangkap dan diadili di daerah Sumatera Utara -Sampai saat ini masyarakat masih was-was terhadap tapal batas antara Sumatera Utara dengan Provinsi Riau
5	Dusun IV Koto Rukun Kepenghuluan Pasir Limau Kapas Kecamatan Pasir Limau Kapas / Sengke-ta masyarakat dengan PT ABM Sumatera Utara	2010	- Lokasi tanah milik masyarakat Podo Rukun diklaim masuk wilayah Sumatera Utara dan termasuk dalam izin lokasi PT AMB, smentara tanah milik masyarakat Podo Rukun tersebut telah ditanami kelapa sawit dan telah dipanen	Ratusa n ha	-Hampir terjadi bentrok antar masyarakat Podo Rukun dengan pihak keamanan perusahaan PT AMB -Warga was-was akan nasib tanah yang mereka usahai
6	Kecamatan Kubu / Sengketa pembagian	2008	-PT Jatim Jaya Perkasa yang membuka lahan perkebunan sawit di Kecamatan Kubu berjanji	Ribua n ha	-Hampir terjadi bentrok antara masyarakat dengan pihak

	lahan Plasma PT Jatim Jaya Perkasa dengan masyarakat Kubu		akan membagikan lahan plasma kepada masyarakat miskin di Kecamatan Kubu		perusahaan -Masyarakat menunggu pembagian lahan plasma yang dijanjikan pihak perusahaan
7	Kepenghuluan Sei Daun Keca-matan Pasir Limau Kapas / sengketa masya-rakat Sei Daun dengan pengusaha perorangan	2011	-Lahan /tanah masyarakat banyak yang diperjual belikan oleh aparaturnya kepada pengusaha yang memiliki modal	Ratusan ha	-Hampir terjadi bentrok antara masyarakat dengan pekerja kebun dari pihak pengusaha atau pemodal
8	Kecamatan Batu Hampar / sengketa PT Sendora Seraya dengan masyarakat di Kecamatan Batu Hampar	2012	-PT Sendora Seraya membuka lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batu Hampar dan berjanji akan membagikan lahan plasma untuk masyarakat miskin di Kecamatan Batu Hampar	Ratusan ha	-Masyarakat sering melakukan aksi damai di depan lokasi kebun kelapa sawit milik PT Sendora Seraya menuntut pembagian lahan plasma yang dijanjikan
9	Kepenghuluan Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih / sengketa kelompok tani Menggala Jaya dengan pemodal	2012	-Kelompok tani Menggala Jaya membuka lahan perkebunan seluas 2500 x 2800 m, yang sumber dananya dikutip dari iuran anggota kelompok tani. Karena keterbatasan biaya salah seorang pengurus kelompok tani berinisiatif memohon bantuan pemodal untuk mengerjakan lahan dimaksud dengan member-kan kompensasi tanah seluas 100 ha kepada pemodal. Namun tindakan pengurus tersebut	100 ha	-Hampir terjadi bentrokan, karena tanaman kelapa sawit milik masyarakat dirusak oleh OTK yang diduga suruhan dair pihak pemodal

			tidak dimusyawarahkan dan tidak diketahui oleh anggota kelompok tani, sehingga lokasi tanah yang diberikan kepada pemodal tumpang tindih dengan tanah milik anggota kelompok tani lainnya.		
--	--	--	--	--	--

Masih banyak sengketa tanah yang tidak terinventarisir di antaranya; sengketa pemenang tender pusat (penanaman hutan di Kecamatan Rimba Melintang dan Bangko Pusako), sengketa kelompok tani masyarakat dengan pengusaha di Paret Aman Kecamatan Bangko, sengketa Tapal batas Rokan Hilir dengan Dumai di Kepenguluhan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih, sengketa masyarakat Kecamatan Pujud dengan Timbang Sianipar dan lain-lainnya.

Pemerintah daerah minim sosialisasi dan realisasi dalam bentuk program pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2012 tentang Intensif Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan. Sebaiknya pemerintah daerah memberikan insentif perlindungan lahan pertanian berkelanjutan kepada apetani, berupa pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan pertanian kelapa sawit. Hampir semua isi PP nomor 12 tahun 2012 menguntungkan petani namun belum kelihatan adanya *good will* pemerintah daerah merealisasikannya lewat program-program membantu petani kelapa sawit.

Konflik terjadi disebabkan kesenjangan kesejahteraan, ketegangan politik, ditambah ketidaktegasan pemerintah dianggap sebagai akar permasalahan merebaknya konflik sosial di daerah Rokan Hilir. Selain itu, rapuhnya serangkaian kohesi sosial dan kecemburuan ekonomi antara warga asli dan pendatang, warga memilih pengadilan gayanya sendiri yaitu kekuatan otot. Hal itu dilakukan karena masyarakat kurang percaya pada pemerintahan di level elite dan mengakibatkan marah-marah, maupun main hakim sendiri serta menciptakan iklim konflik.

Secara khusus responden penelitian mengatakan bahwa mereka pada umumnya menyelesaikan permasalahannya setelah adanya campur tangan dari kelompok tani maupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah tempat tinggal petani kelapa sawit. Penyelesaian yang dilakukan kelompok tani maupun tokoh masyarakat bersifat kekeluargaan dan tidak saling merugikan. Para petani kebun kelapa sawit tidak mau mudah terpropokasi oleh siapapun apabila ada orang khususnya pihak luar yang mau menghasut teman-teman sesama petani sawit.

Salah satu cara petani sawit untuk menghindari konflik horizontal adalah kebersamaan dalam mengikuti gotong royong, menghadiri acara perkawinan, mengunjungi orang sakit maupun jika ada kemalangan yang tidak melihat perbedaan suku, agama maupun daerah asal petani. Selain itu juga melalui kegiatan-kegiatan perwiridan di mesjid, maupun arisan-arisan kampung. Selanjutnya, responden mengakrabkan dirinya apabila tidak bekerja pada sore hari saling berkunjung dan saling bertemu di warung-warung kopi desa sambil bertukar pikiran apabila mengalami hambatan dalam mengolah kebun pertanian kelapa sawit yang mereka miliki.

Petani kelapa sawit pada umumnya berusaha untuk memanfaatkan Kelompok Tani dalam keperluan sawit yang diolah petani. Petani kelapa sawit selalu berusaha tidak akan menjual hasil panen sawitnya kepada pihak tengkulak yang sering menjatuhkan harga sawit yang dimiliki petani. Melalui kelompok tani akan ada jaminan harga, sehingga apapun yang dilakukan pedagang atau pengumpul sawit yang datang ke lapangan mereka tidak terpengaruh dan lebih percaya dengan kelompok tani yang ada di daerahnya.

Di samping itu petani kelapa sawit memelihara dan merawat kearifan lokal agar senantiasa hidup dan menyala di dalam hati petani kelapa sawit. Para petani terus mepupuk, merawat dan selalu menjadi ikhtiar dan tindakan masyarakat petani kelapa sawit Kabupaten Rokan hilir, sehingga diharapkan tak akan ada lagi anak yang harus kehilangan bapak atau

ibunya hanya karena beda agama, beda aliran politik, beda etnisitas dan aroma rasis lainnya. Juga tak akan ada lagi rumah dan harta beda yang dijarah, dan dibakar hanya karena perbedaan identitas. Setiap konflik ada solusinya. Para leluhur telah memberikan peninggalan atau warisan nilai untuk itu dan tinggal tekad petani kebun kelapa sawit, mau menggunakannya atau membuangnya.

Pada umumnya responden yang memiliki kebun kelapa sawit bertetangga dengan petani sawit yang tidak sama daerah asalnya, antara lain dengan etnis Jawa, Batak, Melayu, Bugis, Minang dan secara keseluruhan petani tidak ada bertetangga dengan etnis Tionghoa terkecuali dengan pihak perusahaan pemilik modal besar. Walaupun bertetangga tidak satu etnis, para petani selalu berusaha saling menyesuaikan diri untuk dapat hidup secara harmonis. Petani kelapa sawit di daerah Rokan Hilir lebih mengutamakan hidup yang sejahtera daripada memikirkan hal-hal yang berbeda dalam ras mendatangkan konflik.

Munculnya sejumlah konflik horizontal antara petani kelapa sawit dengan pihak lainnya dapat disimpulkan disebabkan tiga hal yaitu; Ketidakjelasan regulasi lahan yang kurang responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat terutama petani Rokan Hilir. Kurang optimalnya pemetaan fungsi lahan secara tidak jelas, baik untuk pertanian, kehutanan dan pertambangan. Kurang optimalnya fungsi sosial tanah, baik untuk pengembangan sumber daya alam, sumber daya air maupun sumber daya manusia.

Kepemilikan lahan yang semakin banyak dikuasai oleh perusahaan swasta dan pemodal besar membuat masyarakat tradisional yang selama ini hidup bergantung pada lahan kelapa sawit kian terdesak. Di tengah-tengah jumlah penduduk Kabupaten Rokan Hilir yang terus bertambah, pemerintah, pemilik modal, dan rakyat berebut ruang kelola yang terbatas demi memenuhi kepentingannya masing-masing. Kondisi tersebut memicu kerusakan hutan yang semakin tak

terbendung. Perambahan tak lebih hebat apabila dibandingkan dengan kebijaksanaan pemerintah daerah yang kadang tak berpihak kepada masyarakat atau mengindahkan kelestarian hutan.

Kerusakan hutan secara sistematis terjadi akibat kebijakan pemerintah daerah yang mengedepankan kepentingan pemilik modal. Elite pemerintah mendapatkan keuntungan ekonomi dari proses kebijakan tersebut. Di tengah maraknya berbagai konflik yang kadang berujung pada pertumpahan darah pemerintah daerah seolah tak berdaya. Berbagai kebijakan pemerintah daerah pun terlihat belum tegas diberlakukan. Sebagian elite pemerintahan justru terlihat sibuk dengan agenda politiknya masing-masing.

Reformasi agraria mutlak dilakukan. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Semangatnya perlu dikembalikan pada keberpihakan terhadap rakyat petani yang merupakan mayoritas di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan adanya penuntasan reformasi agraria, secara langsung maupun tidak langsung daerah dapat menyelesaikan berbagai persoalan pelik di masyarakat, seperti konflik horizontal dan kekerasan sosial, sekaligus dapat memberdayakan rakyat petani itu sendiri.

Kawasan yang cenderung terbiarkan atau kurang digarap secara maksimal oleh masyarakat tempatan akibat minimnya sumber daya manusia serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk mengolah lahan secara maksimal. Hal tersebut menjadi celah untuk dimanfaatkan oknum-oknum dari luar yang melibatkan aparaturnya atau kepenghuluan, dengan membentuk kelompok tani yang kemudian menjual tanpa aturan yang jelas. Sudah saatnya pemerintah daerah memprioritaskan menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang terjadi di Rokan Hilir, jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di negerinya sendiri, sementara orang luar menjadi raja di wilayah Rokan Hilir.

Sengketa lahan tidak bisa dianggap enteng, maka persoalan lahan harus menjadi perhatian serius pemerintah kabupaten Rokan Hilir, sebelum timbulnya korban jiwa seperti yang terjadi di Kecamatan Simpang Kanan yang berbatasan langsung dengan Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara. Pada saat dilaksanakan penelitian, dua orang pengusaha kebun kelapa sawit yang berasal dari Medan masih proses pengadilan di Pekanbaru, yang masing-masing pihak mengklaim tanah kebun kelapa sawit yang menjadi objek perkara adalah miliknya, walaupun sudah keluar ketetapan dari Mahkamah Agung siapa yang menjadi pemilik yang sah.

Ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan :

- a. Kehadiran perusahaan mengambil hak-hak masyarakat, hal ini terlihat dari adanya bentuk-bentuk sengketa tanah ulayat.
- b. Kehadiran perusahaan menyebabkan kerugian dan gangguan bagi masyarakat seperti terjadi pencemaran, polusi udara dan gangguan lainnya sehingga masyarakat merasa perlu melakukan tindakan perlawanan.
- c. Kehadiran perusahaan tidak memiliki sumbangsih terhadap masyarakat lokal, sehingga masyarakat merasa perusahaan sebagai pengurus kekayaan lokal.
- d. Perusahaan tidak melibatkan dan memberdayakan potensi masyarakat lokal dalam hal peluang bekerja dan pelaksanaan proyek-proyek perusahaan.

Berbagai konflik lokal dan horizontal di sejumlah wilayah Rokan Hilir juga terjadi disebabkan masyarakat berada dalam situasi yang tidak tenang. Kondisi masyarakat sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi para pemimpin di atas yakni para elite politik. Kalau sekarang para elite politik meributkan masalah koalisi partai politik, suksesi pemilihan calon Gubernur Riau, masalah Pemilihan Umum tahun 2014 yang akan datang, sementara rakyat masih berada dalam

kondisi susah. Pada kondisi itu, para agamawan, akademisi, dan budayawan juga memegang peranan untuk meredam dan membantu menciptakan kondisi tenang di masyarakat sesuai peran yang dijalannya masing-masing.

Agamawan harus memberikan pengertian yang benar terhadap pemeluknya. Misalnya agama tidak membenarkan tindakan perusakan atau kekerasan terhadap sesama manusia. Juga tidak melakukan intimidasi, dan tidak menguasai sesuatu yang bukan haknya. Kalangan agamawan, bisa membantu meredam gejolak dengan mengeluarkan berbagai fatwa yang menyejukkan dan selalu mengingatkan pemeluknya jika melakukan tindakan yang keliru. Agamawan dapat melakukan pendekatan melalui siraman rohani melalui kegiatan di mesjid, gereja, arisan dan pertemuan-pertemuan tertentu yang dilaksanakan petani.

Akademisi seperti guru dan dosen berperan dalam mendidik para anak didiknya agar selalu bersikap santun, menghargai orang lain, dan mencintai perdamaian. Melakukan sikap menghargai orang lain merupakan benteng untuk meninggalkan rasa egosentriame pada anak didik. Kalangan dari budayawan dan seniman, memiliki peran tersendiri. Mereka yang menyentuh hati dan emosi mendalam untuk merenungkan kondisi daerah dan masyarakat desa yang terjadi. Budayawan dan seniman bisa menelurkan karya menyejukkannya melalui puisi dan prosa. Selain itu, melalui pagelaran seni yang memunculkan keragaman budaya adalah salah satu akar kekuatan pemersatu masyarakat. Kalau ketiga kalangan ini sinergi, bisa meredam konflik horizontal yang terjadi di masyarakat.

Lebih lanjut hasil wawancara terhadap responden mengatakan bahwa konflik lokal sering terjadi di Kabupaten Rokan Hilir juga dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

a. Perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas; Perbedaan distribusi kekuasaan inilah yang kemudian memunculkan dua kelompok petani kelapa sawit yang berbeda posisi yakni kelompok dominan dan kelompok subordinat. Mereka yang berada pada posisi dominan cenderung mempertahankan status quo, sementara yang berada pada posisi subordinat selalu berupaya mengadakan perubahan terus menerus. Sering terjadi konflik horizontal yang disebabkan perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas pada petani kelapa sawit.

b. Prasangka/persepsi

Prasangka atau pemaknaan yang tidak benar terhadap simbol dan identitas orang lain yang menimbulkan terjadinya konflik. Terjadinya penggunaan simbol-simbol tertentu digunakan pihak ketiga untuk mengadu domba para petani kelapa sawit. Petani kelapa sawit sering dibenturkan dengan berbagai cara, dan konflik horizontal tidak terelakkan dan pada akhirnya menguntungkan pihak pengusaha sebagai pemilik modal.

c. Perbedaan Nilai

Nilai merupakan sesuatu yang menjadi dasar, pedoman, tempat setiap manusia menggantungkan pikiran, perasaan dan tindakan. Perbedaan rasa percaya, keyakinan bahkan ideologi menyebabkan terjadinya konflik horizontal petani kelapa sawit. Kearifan lokal sering dilupakan, pada hal menyelesaikan suatu permasalahan pada masyarakat tidak memerlukan kekerasan cukup dengan pendekatan kearifan lokal yang dimiliki setiap etnis. Setiap adat, setiap budaya dan setiap kelompok masyarakat memiliki kearifan lokalnya masing-masing. Kearifan lokal dimasing-masing adat memiliki fungsi yang secara umum membantu kehidupan masyarakatnya sendiri. Hal itu meliputi permasalahan dalam rumah tangga, agraria, tata pemerintahan, penyelesaian konflik, spiritual, nilai nilai perikehidupan,

dan lain lain. Konflik yang timbul antar suku maupun antar kelas dapat diselesaikan dengan lokal genius dari masing-masing kelompok masyarakat.

d. Perbedaan kepentingan

Kepentingan masyarakat tani tidak semuanya sama. Ada latar belakang kepentingan material, ada pula kekuasaan, dan bahkan ada kepentingan mengadu domba masyarakat yang kondusif. Adanya perbedaan kepentingan pada setiap individu atau kelompok merupakan potensi terjadinya konflik. Perbedaan kepentingan yang merusak tatanan hidup harmonis dalam masyarakat petani akan dapat menimbulkan dampak kemiskinan dan juga merusak ekonomi keluarga yang sejahtera.

e. Kurang komunikasi

Kegagalan dalam berkomunikasi menyebabkan kedua pihak tidak dapat menyampaikan pikiran, perasaan dan tindakan sehingga membuka jurang perbedaan informasi di antara mereka, sehingga petani kebun kelapa sawit menjadi salah paham dan menimbulkan terjadinya konflik. Petani kebun kelapa sawit yang jarang berbaur dengan masyarakat lokal atau berbeda dalam agama, etnis, dan asal usul orientasi kedaerahannya sangat sensitif dan merasa bahwa dirinya adalah yang terbaik dibanding dengan orang lain

f. Kepemimpinan yang kurang efektif

Konflik karena kepemimpinan yang kurang efektif terjadi pada kehidupan bersama dalam komunitas petani kelapa sawit. Kepemimpinan kurang efektif mengakibatkan masyarakat mudah bergerak dan bahkan tidak terkendali tanpa ada yang menggerakkan.

g. Ketidakcocokan peran

Ketidakcocokan peran terjadi karena ada dua pihak yang mempersepsikan secara sangat berbeda tentang peran mereka masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik. Tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa tidak mampu memerankan perannya sesuai dengan fungsi masing-masing dan akhirnya muncul konflik.

h. Kesenjangan

Kesenjangan adalah adanya bentuk-bentuk perlakuan yang tidak adil, perbedaan kemampuan dalam mengakses suatu kebutuhan, tidak meratanya pembangunan adalah penyebab terjadinya konflik. Adanya diskriminasi pembangunan pedesaan di Rokan Hilir menimbulkan gejolak pada masyarakat yang merasa ditinggalkan dalam kebutuhan prasarana dan sarana pembangunan.

i. Ketidakpuasan/kecewa

Adanya rasa tidak puas atau kecewa atas apa yang dialami atau diterima oleh petani kelapa sawit atau kelompok menyebabkan mudah terjadi konflik horizontal. Para petani kelapa sawit merasa kecewa dengan janji yang diberikan pihak pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, termasuk pihak perusahaan yang tidak pernah memenuhi janjinya kepada petani kelapa sawit.

Untuk itu, berdasarkan hasil rangkungan wawancara dengan responden dan menghindarkan konflik horizontal bagi petani kelapa sawit adalah :

- a. Perusahaan harus hadir dengan pemahaman kondisi, kultur dan karakteristik masyarakat lokal.

- b. Memberikan konvensasi terhadap segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan.
- c. Melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat lokal sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat.
- d. Melibatkan dan mendidik pengusaha lokal dalam hal pelaksanaan proyek-proyek perusahaan.
- e. Merekrut tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan yang ada. Tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton di daerahnya tetapi harus diberdayakan dan menjadi asset penting dalam mendukung pembangunan kelapa sawit

Selain yang dikemukakan di atas, diperlukan kemampuan berkomunikasi antar petani kelapa sawit. Kemampuan berkomunikasi merupakan hal utama yang harus dimiliki petani kelapa sawit sehingga dapat menciptakan komunikasi dua arah yang sangat komprehensif. Pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan agar para petani kelapa sawit mempunyai kemampuan untuk dalam pengertian hukum, permasalahan komunikasi antar budaya dan juga member pengertian kepada petani kelapa sawit adat tentang hak dan kewajiban dalam pemeliharaan kemajemukan. Akhirnya petani kelapa sawit mempunyai kemampuan untuk melakukan langkah-langkah yang tepat guna memecahkan permasalahan yang terjadi yang tetap mengacu pada aturan hukum adat. Petani kelapa sawit juga memiliki kemampuan untuk dapat menahan diri tidak melakukan tindakan –tindakan yang melawan hukum dan terjadinya konflik horizontal.

C. MENGATASI KONFLIK

Konflik sosial yang terjadi dan tidak terkelola dengan baik dapat berakibat pada lemahnya sistem produktivitas masyarakat maupun pihak-pihak terkait seperti perusahaan, dan pemerintah, disebabkan iklim lingkungan sosial yang tidak kondusif. Sebaliknya bila, potensi konflik sosial dapat dikelola dengan baik melalui interaksi dan komunikasi yang baik, dapat berdampak positif pula bagi upaya mewujudkan kesejahteraan social. Namun, bila kurang mampu mengelolanya maka dapat berdampak buruk bagi kedamaian, keserasian kehidupan sosial di daerah tersebut.

Berbagai isu muncul dan berkembang di masyarakat di masyarakat Rokan Hilir. Aspek tersebut menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial, yang merupakan potensi konflik, salah satunya karena masalah kesenjangan akses ekonomi antar masyarakat setempat dengan pendatang, serta antar masyarakat dengan pihak perkebunan. Pengelolaan potensi konflik agar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat maka perlu dikembangkan dan dipertahankan usaha untuk menumbuhkan keserasian hidup antar berbagai pihak yang berinteraksi dan berkomunikasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal terkait dengan pengembangan hasil perkebunan kelapa sawit di masa yang akan datang. Tabel di bawah ini menunjukkan konflik akan terminimalisir apabila ada interaksi dan komunikasi yang saling mendukung serta adanya kebersamaan antara masyarakat petani daerah dengan masyarakat pendatang.

Tabel 7 : Tanggapan Responden mengenai interaksi dan komunikasi antar Putera daerah dan pendatang.

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	83	50,61
2	Jarang	19	11,59
3	Tidak Pernah	52	31,71
4	Tidak Jawab	10	6,10
		164	100

Sumber : Olahan data survey, 2012

Jika ditinjau dari tanggapan masyarakat akan pemahaman tentang konflik yang timbul disebabkan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat daerah tempatan tidak membangun saling pengertian dan memelihara hubungan baik dengan berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini membuktikan bahwa masyarakat mengerti konflik pada dasarnya disebabkan oleh faktor komunikasi. Dari 164 responden sebanyak 83 orang atau 50,61% menanggapi sering, 19 orang atau 11,59% mengatakan jarang, 53 orang atau 31,71% menyatakan tidak pernah, dan 10 orang atau 6,10% tidak menjawab atau tidak memberi tanggapan.

Dari tanggapan yang diberikan, ternyata masih terdapat pemahaman masyarakat bahwa perlakuan diskriminasi bisa menimbulkan konflik antar masyarakat. Hal ini mengindikasikan perlunya segera dirumuskan tentang bagaimana mengantisipasi agar konflik antar masyarakat tempatan dan pendatang tidak terjadi dan tidak ada kecemburuan sosial. Karena konflik merupakan salah satu bentuk interaksi disosiatif yang merupakan ekspresi perbedaan pendapat, pandangan, kepentingan atau bahkan pertikaian antara individu dengan individu lain, kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan. Dalam pandangan ini, pertikaian menunjukkan

adanya perbedaan antara dua atau lebih individu yang diekspresikan, diingat, dan dialami dalam perspektif kognitif, afektif maupun tindakan (konatif).

Interaksi dan komunikasi antara individu yang satu dengan yang lainnya, berpotensi menimbulkan konflik dalam level yang berbeda-beda. Dari perspektif perilaku dalam proses sosial, konflik merupakan bentuk interaktif yang terjadi pada tingkatan individual, interpersonal, kelompok atau pada tingkatan organisasi. Konflik akan selalu berpusat pada beberapa penyebab utama, yakni tujuan yang ingin dicapai, alokasi sumber-sumber yang dibagikan, keputusan yang diambil, maupun perilaku setiap pihak yang terlibat. Penyebab konflik bukan hanya bisa terjadi karena permasalahan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, tapi bisa juga disebabkan kelompok lain, seperti pihak pengusaha perkebunan kelapa sawit yang tujuannya hanya untuk kepentingan pribadi yang memanfaatkan isu tentang putera daerah.

Para petani di daerah Kabupaten Rokan Hilir telah menjalin hubungan baik dengan pengusaha perkebunan, terlihat dari jawaban responden yang sebagian besar menjawab tidak pernah mendengar bahwa masyarakat dimanfaatkan oleh pihak pengusaha demi kepentingan pribadi yaitu sebesar 43,29 %. Namun masih ada juga yang menjawab jarang mendengar, artinya ada sebagian pemahaman masyarakat tentang konflik sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan oleh para pengusaha perkebunan kelapa sawit untuk kepentingan pribadi berjumlah 28,05%; yang menjawab sering mendengar 23,17%, sedangkan yang tidak menjawab 5,49%. Sumber konflik sosial antar berbagai pihak, yang melibatkan berbagai perusahaan perkebunan sawit di berbagai wilayah. Hal ini mengindikasikan perlunya segera dirumuskan tentang bagaimana mengantisipasi perkembangan konflik sosial yang terjadi dan membangun upaya resolusi konflik serta strategi pengelolaan konflik sosial terkait perkebunan sawit ini.

Manysadari keberadaan konflik dan memahami keberadaan konflik secara dini akan mencegah disintergrasi kehidupan masyarakat di seputar perkebunan kelapa sawit. Konflik berpotensi menimbulkan inefisiensi atau bahkan pemborosan yang serius ketika sampai mengganggu operasionalisasi perusahaan dan usaha tani perkebunan rakyat yang ada. Stabilitas sosial, ekonomi dan politik setempat sangat terganggu dan akhirnya rakyatlah yang menjadi korban lebih besar dan perusahaan besarpun menghadapi masalah dalam berinvestasi di lahan perkebunan sawit.

Tabel 8: Konflik karena memanfaatkan istilah putera daerah

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	38	23,17
2	Jarang	46	28,05
3	Tidak Pernah	71	43,29
4	Tidak Jawab	9	5,49
164			100

Sumber : Olahan data survei 2012

Masyarakat daerah Rokan Hilir tingkat pemahaman tentang toleransi beragama sangat kuat, terbukti masyarakat hidup berdampingan di antara agama, etnis, bahkan dari daerah dan asal yang berbeda. Ini terlihat dari hasil survei di lapangan, mereka akan tetap bekerja dan tidak peduli apakah tetangga sebelah lahan kelapa sawitnya bukan orang yang berasal dari daerah, etnis, bahkan agama yang berbeda. Dari jawaban responden di lapangan sebesar 50,61 % menjawab sering atau setuju kalau masyarakat dalam interaksi dengan mesyarakat lainnya tidak memperlmasalahkan etnis, agama, dan bahkan asal daerah, sedangkan 10,37% menjawab jarang, 19,51 % menjawab tidak pernah. Dan tidak menjawab sebesar 7,32 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9 : Mengolah lahan walaupun berbatasan langsung dengan orang yg tidak satu agama, satu bahasa, satu daerah, dan satu etnis.

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	103	50,61
2	Jarang	17	10,37
3	Tidak Pernah	32	19,51
4	Tidak Jawab	12	7,32
		164	100

Sumber : Olahan data survey, 2012

Masyarakat di daerah Rokan Hilir menyadari bahwa keberadaan konflik dapat mencegah disintergrasi kehidupan masyarakat di seputar perkebunan kelapa sawit. Konflik berpotensi menimbulkan pemborosan yang serius ketika sampai mengganggu usaha tani perkebunan masyarakat yang ada.

Daerah kabupaten Rokan Hilir juga memiliki potensi konflik yang dapat menimbulkan integrasi nasional, yaitu pontensi konflik antarsuku, agama, ras, golongan, pusat-daerah, sipil-militer, lembaga-lembaga pemerintah/negara, Jawa-non Jawa, penguasa-masyarakat, dan lain-lain. Selain itu, terdapat potensi konflik yang mewarnai implementasi otonomi daerah, seperti konflik antarpemerintah lokal (saling berbatasan), konflik-konflik antar kekuatan rakyat berbasis lokal melawan aparat pemerintah, konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan sebagainya.

Tabel 10 : Menciptakan konflik petani kelapa sawit dengan memanfaatkan perbedaan suku, agama, asal usul maupun ras

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	23	14,02
2	Jarang	18	10,98
3	Tidak Pernah	108	65,85
4	Tidak Jawab	15	9,15
		164	100

Sumber : Olahan data survey, 2012

Ciri kemajemukan masyarakat di daerah Rokan Hilir antara lain masyarakatnya yang terdiri dari bermacam suku, etnis, dan agama mengandung potensi konflik. Namun justru keberagaman isu tentang suku, etnis dan bahkan agama tidak menjadikan daerah ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab. Terbukti ada 65,85% masyarakat menjawab konflik terjadi bukan diakibatkan oleh pihak pengusaha perkebunan sawit yang menciptakan dan memanfaatkan isu perbedaan suku, agama, maupun asal-usul daerah maupun ras. Sedangkan yang menjawab terjadi konflik disebabkan isu tersebut sebesar 14,02%, dan yang menjawab jarang terjadi sebesar 10,98 %. Dari jawaban responden tersebut dapat menjelaskan bahwa di daerah Rokan Hilir konflik terjadi bukan hanya disebabkan propokasi dari pihak pengusaha perkebunan yang memanfaatkan isu perbedaan suku, agama, asal-usul maupun ras.

Tabel 11 : Konflik disebabkan batas kebun maupun tetangga tempat tinggal

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	21	12,80
2	Jarang	41	25,00
3	Tidak Pernah	91	55,49
4	Tidak Jawab	11	6,71
		164	100

Sumber : Olahan data survey, 2012

Tingginya kesadaran masyarakat tentang keberadaan konflik yang sering muncul bisa disebabkan oleh masalah perbatasan lahan/kebun atau disebabkan oleh faktor ketidakhamonisan dengan tetangga juga menjadi isu dan perhatian penting untuk dibahas. Terbukti dari hasil penelitian sebesar 12,80 % masyarakat sering mengalami konflik karena masalah perbatasan, namun ada yang menjawab sebanyak 25,00% menjawab jarang terjadi karena masalah itu. Sedang sebagian besar masyarakat menjawab tidak pernah mengalami konflik karena masalah perbatasan lahan/kebun sebanyak 55,49%. Ini artinya ada pemahaman dan saling pengertian sangat baik dari anggota masyarakat petani yang ada di daerah ini.

Sumber-sumber konflik dalam suatu negara antara lain konflik separatis, perebutan sumber daya alam, persoalan SARA/etnisitas, kesenjangan ekonomi, kriminalitas, pengangguran, perang saudara, pemberontakan bersenjata, politik, dan sebagainya. Namun daerah ini juga memiliki potensi konflik lain yang dapat menimbulkan integrasi nasional, yaitu potensi konflik antarsuku, agama, ras, golongan, pusat-daerah, sipil-militer, lembaga-lembaga pemerintah/negara, Jawa-non Jawa, penguasa-masyarakat, dan lain-lain. Selain itu, terdapat potensi konflik yang mewarnai implementasi otonomi daerah, seperti konflik antarpemerintah lokal (saling

berbatasan), konflik-konflik antarkekuatan rakyat berbasis lokal melawan aparat pemerintah, konflik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan sebagainya.

Umumnya konflik tentang identitas dalam suatu masyarakat cenderung lebih rumit, bertahan lama serta sulit dikelola, sedangkan konflik yang berciri primordial sulit dipecahkan karena sangat emosional. Untuk mengatasi itu semua, tidak ada resep mujarab yang langsung menyembuhkan karena selalu muncul interaksi rumit antarkekuatan berbeda di samping variabel kondisi sosial wilayah ini. Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma nasional atau lokal agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan bangsa kita.

Faktor-faktor pendukung analisis pemecahan konflik tersebut antara lain: aktornya, isu, faktor penyebab, lingkupnya, usaha lain yang pernah ada, jenis konflik, arah/potensi, sifat kekerasan, wilayah, fase dan intensitas, kapasitas dan sumbernya, alatnya, keadaan hubungan yang bertikai, dan sebagainya. Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat yang bersifat kekeluargaan .

Tabel 12 : Penyelesaian konflik lahan perkebunan baik individu maupun kelompok secara kekeluargaan

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	121	73,78
2	Jarang	17	10,37
3	Tidak Pernah	15	9,15
4	Tidak Jawab	11	6,71
		164	100

Sumber : Olahan data survei 2012

Ternyata masyarakat lebih banyak memanfaatkan teknik dan strategi yang mereka miliki sendiri, ini terbukti dari jawaban yang diberikan sebesar 73,78 % ketika terjadi permasalahan, cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Sebesar 10,37 % menjawab jarang melakukannya, dan hanya sebagian kecil mereka menjawab tidak pernah, karena memang tidak pernah mengalami konflik.

Ada beberapa modus konflik yang terjadi, salah satunya adalah pengalihan isu yang sering terjadi dalam konflik petani perkebunan kelapa sawit. Ada upaya sistematis yang dilakukan baik itu pengusaha ataupun penguasa untuk mengalihkan isu dari persoalan sengketa tanah menjadi masalah kriminal. Adanya intimidasi pihak pengusaha kepada para petani. Hal semacam ini dapat berpotensi berdampak sangat buruk bagi citra perkebunan sawit, oleh karena itu cara-cara yang tidak manusiawi dan melanggar hak azasi manusia (HAM) perlu dihindari oleh semua pihak terkait. Berdasarkan pelaku dan sumberdaya yang dimiliki konflik perkebunan muncul diantara perusahaan perkebunan itu sendiri, dengan pemerintah dan dengan komunitas di sekitarnya (Ivan dan Fajar, 2010).

Tabel 13 : Tanggapan responden atas intimidasi kepada petani sawit dari pihak pengusaha

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	30	18,29
2	Jarang	37	22,56
3	Tidak Pernah	86	52,44
4	Tidak Jawab	11	6,71
		164	100

Sumber : Olahan data survey, 2012

Berdasarkan hasil penelitian, sebesar 18,29% masyarakat menjawab sering terjadi intimidasi kepada para petani sawit dan mengaku bahwa lahan perkebunan sawit yang dimiliki masyarakat diakui oleh pengusaha, dan yang menjawab jarang terjadi sebesar 22,56 %. Sedangkan yang menjawab tidak pernah terjadi sebesar 52,44%. Ini mengindikasikan bahwa masih ada perlakuan tentang pengakuan dari para pengusaha melakukan intimidasi terhadap petani perkebunan sawit yang dimiliki masyarakat.

Isu tentang konflik antara pengusaha perkebunan sawit dengan masyarakat selalu muncul. Terjadinya ganti rugi yang tidak memadai dan keputusan harga hanya sepihak dari pihak pengusaha juga sebenarnya merupakan salah satu faktor penyebab konflik. Namun di daerah Rokan Hilir ternyata sebagian besar masyarakat menjawab tidak pernah terjadi konflik antara masyarakat dan pengusaha kelapa sawit disebabkan masalah harga lahan, terbukti sebesar 67,07% yang menjawab tidak ada penekanan harga secara sepihak dari pihak pengusaha, namun ada yang menjawab pernah terjadi sebesar 11,59%. Menjawab sering terjadi adanya penekanan ganti rugi tanah secara paksa dari pihak pengusaha kepada masyarakat dan harga ditentukan sepihak oleh para pengusaha sebesar 13,41%. Ini menunjukkan bahwa intensitas konflik di

daerah tersebut sangat sedikit dipengaruhi oleh faktor pihak pengusaha sebagai penentu harga dan sistem penjualan tanah oleh masyarakat.

Tabel 14 : Tanggapan responden ganti rugi tanah dengan cara paksa dengan harga yang ditentukan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	22	13,41
2	Jarang	19	11,59
3	Tidak Pernah	110	67,07
4	Tidak Jawab	13	7,93
		164	100

Sumber : Olahan data survey,2012

Berdasarkan pelaku dan sumberdaya yang dimiliki, konflik perkebunan juga muncul di antara perusahaan perkebunan itu sendiri, dengan pemerintah dan dengan komunitas di sekitarnya. Hal ini terjadi karena adanya keinginan pihak-pihak tertentu terutama sekali bagi pihak pengusaha perkebunan yang selalu memaksakan kehendak untuk mengambil alih lahan dengan cara menawarkan ganti rugi lahan dengan harga yang telah ditetapkan oleh sepihak.

Tabel 15: Sikap responden tidak melepaskan tanah warisannya karena janji-janji pihak pengusaha sawit

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	15	9,15
2	Jarang	37	22,56
3	Tidak Pernah	96	58,54
4	Tidak Jawab	16	9,76
		164	100

Sumber : Olahan data survei 2012

Kebanyakan masyarakat petani di daerah Rohil sudah lama tinggal dan mengelola lahan pertanian kelapa sawitnya. Mereka sangat yakin dan berpegang teguh pada prinsip dan pendirian, walaupun pihak pengusaha perkebunan sawit memberikan iming-iming atau janji-janji tentang harga yang tinggi agar masyarakat mau menjual tanahnya, namun kebanyakan masyarakat tidak akan menjualnya. Terbukti dari hasil survei dilapangan, sebanyak 58,54% menjawab tidak pernah, artinya tidak akan terpengaruh dan tidak akan menjual lahannya oleh janji-janji yang diberikan oleh pengusaha sawit. Namun ada juga yang menjawab akan menjual tanah warisannya kepada pihak pengusaha sawit dengan harga yang menguntungkan sebesar 9,15%. Tetapi bagi yang menjawab jarang dan sering dilakukan ketika pengusaha menawarkan harga dan janji-janji yang menguntungkan sebesar 22,56%. Ini menunjukkan masih besar persentase masyarakat yang tidak mudah percaya dan tidak tergiur oleh iming-iming harga dari pihak perusahaan.

Di antara permasalahan yang sering terjadi dan menyebabkan timbulnya konflik adalah adanya data dan informasi yang tidak jujur dan tidak dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga sulit menemukan kesepakatan dan terjalannya komunikasi. Bagi masyarakat, proses pengelolaan hasil sumber daya sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak pengelola antara lain koperasi dan pengusaha.

Tabel 16 : Pendapat responden petani kelapa sawit dirugikan koperasi maupun pengusaha dengan menekan harga murah

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	42	25,61
2	Jarang	24	14,63
3	Tidak Pernah	83	50,61
4	Tidak Jawab	15	9,15
		164	100

Sumber : Olahan data survey, 2012

Sesuai data di lapangan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pengusaha atau pengelola koperasi sangat tinggi, sehingga sebagian besar responden ketika dilakukan survei menjawab tidak pernah terjadi bagi petani kelapa sawit dirugikan oleh pengusaha atau pihak koperasi dengan adanya penekanan harga ke masyarakat, berjumlah 50,61%, sedang ada yang menjawab sering atau pernah dilakukan oleh pihak koperasi atau pengusaha untuk memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Berjumlah 25,61 % menjawab sering atau selalu masyarakat mendapatkan kerugian karena pihak koperasi atau pengusaha sawit tidak transparan terhadap harga yang diberikan kepada masyarakat.

Konflik merupakan sesuatu yang hampir tidak mungkin bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki kepentingan, kehendak, serta cita-cita konflik senantiasa mengikuti mereka. Oleh karena dalam upaya untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan pastilah ada hambatan-hambatan yang menghalangi, dan halangan tersebut harus disingkirkan. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jika hal ini terjadi, maka konflik merupakan sesuatu yang niscaya terjadi dalam masyarakat.

Konflik dan kehidupan manusia tidak mungkin untuk dapat dipisahkan dan keduanya berada bersama-sama karena perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan keterbatasan sumber daya itu memang pasti ada dalam masyarakat. Konflik akan selalu kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sebab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban.

Keterbukaan dan keseriusan dalam mengurai akar permasalahan konflik dan komunikasi yang baik dan terbuka antarpihak yang berkepentingan merupakan cara penanganan konflik yang perlu dikedepankan. Adanya data dan informasi yang jujur dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan merupakan syarat bagi terjalannya komunikasi di atas.

Tabel 17 : Frekuensi responden dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan tanah perkebunan kelapa sawit yg dimilikinya

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah (orang)	%
1	Sering	96	58,54
2	Jarang	16	9,76
3	Tidak Pernah	37	22,56
4	Tidak Jawab	15	9,15
164			100

Sumber : Olahan data survey, 2012

Kearifan lokal yang bisa menyelesaikan dan menangani konflik salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat mengolah lahannya sesuai cara mereka untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada, termasuk menjaga dan menyelesaikan masalah antar individu dengan individu yang lain termasuk dengan rekan kelompoknya. Salah satunya adalah menjaga dan mengelola lahannya sendiri, dan memelihara perkebunan kelapa sawitnya untuk keberlangsungan hidup mereka. Terbukti, walaupun pihak pengusaha memberikan janji dengan harga yang mahal namun masyarakat tidak akan melepaskan tanah / lahan mereka. Sebesar

58,54% masyarakat menjawab sering dan akan mengolah sendiri dengan memelihara dan mempertahankan tanah mereka meskipun pengusaha sawit berjanji menjanjikan harga yang mahal. Sedangkan yang menjawab jarang atau pernah menjual karena dipengaruhi oleh para pengusaha sebesar 9,76%. Dan 22,56% masyarakat menjawab tidak pernah, artinya akan menjual dan menyerahkan lahan sawitnya.

Walaupun untuk resolusi konflik terhadap masalah di atas dapat ditempuh melalui manajemen sosial sesuai dengan latar belakang masing-masing tipe konflik, yaitu melalui kekuasaan pemaksa, kekuasaan hukum, gerakan sosial dan program-program ekonomi. Berdasarkan pelaku dan sumberdaya yang dimiliki resolusi konflik antara manajemen perkebunan dengan komunitas seyogyanya sesuai dengan tipologi konflik yang ada. Mengadopsi kearifan lokal yang ada dengan membiarkan masyarakat mengelola lahannya sesuai dengan cara mereka selama ini dan memberikan akses yang sebesar-besarnya terhadap sumber-sumber produksi rakyat seperti, air, tanah, lahan pertanian, modal, teknologi, jalur distribusi dan infrastruktur pendukung lainnya merupakan sesuatu yang jauh lebih penting ketimbang memaksakan suatu kebijakan.

Model pluralisme budaya, dapat membantu untuk melakukan resolusi konflik. Misalnya, individu atau kelompok diajak memberikan reaksi tertentu terhadap pengaruh lingkungan sosial dengan mengadopsi kebudayaan yang baru masuk. Inilah yang kemudian sebagai asimilasi budaya. Selain asimilasi, faktor yang bisa menyelesaikan konflik adalah akomodasi. Dalam proses akomodasi, dua kelompok atau lebih yang mengalami konflik harus sepakat untuk menerima perbedaan budaya, dan perubahan penerimaan itu harus melalui penyatuan penciptaan kepentingan bersama. Akibat dari interaksi antar budaya yang berbeda ternyata mendorong adanya perubahan-perubahan dan saling memberi motivasi antara kelompok tani yang ada.

Pola penyelesaian konflik di suatu daerah tak mungkin diterapkan di daerah lain. Oleh karena itu, dalam menentukan langkah penyelesaian berbagai peristiwa konflik perlu dicermati dan dianalisis, tidak saja berdasarkan teori-teori konflik universal, tetapi perlu juga menggunakan paradigma nasional atau lokal agar objektivitas tetap berada dalam bingkai kondisi, nilai, dan tatanan kehidupan bangsa kita. Cara penyelesaian konflik lebih tepat jika menggunakan model-model penyelesaian yang disesuaikan dengan kondisi wilayah serta budaya setempat. Ideal apabila penyelesaian tersebut dilakukan atas inisiatif penuh dari masyarakat bawah yang masih memegang teguh adat lokal serta sadar akan pentingnya budaya lokal dalam menjaga dan menjamin keutuhan masyarakat.

Dilihat dari perspektif pemberdayaan masyarakat pengelolaan potensi konflik dan resolusi konflik perlu dilihat secara proporsional dan secara kontekstual. Tindakan yang dipilih dalam pemberdayaan masyarakat bisa mencakup pengembangan kapasitas individu petani kelapa sawit, kelompok atau organisasi masyarakat, masyarakat dan pengembangan koordinasi lintas instansi sektoral maupun kooordinasi horisontal dan vertikal dalam instansi pemerintahan.

Permasalahan sosial pengembangan perkebunan kelapa sawit sangat kompleks dan telah banyak dikhawatirkan oleh berbagai pihak dari berbagai perspektif setelah diperhitungkan dampaknya. Selain permasalahan konflik sosial seperti yang telah dibahas, perlu perhatian khusus juga masalah pendidikan yang masih rendah bagi masyarakat di daerah Rokan Hilir. Beberapa indikasi data menyiratkan implikasi bagi pihak-pihak terkait untuk memperhatikan secara lebih khusus.

Rendahnya tingkat pendidikan perlu disadari dalam upaya pemberdayaan masyarakat haruslah menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat setempat, misalnya menggunakan bahasa, teknik dan media komunikasi yang dapat diakses oleh

kebanyakan masyarakat yang berpendidikan relatif rendah tersebut. Kearifan lokal merupakan khasanah yang dimiliki oleh sistem masyarakat dalam membangun mekanisme penyelesaian sengketa berbasis pada nilai-nilai, kebiasaan, kepercayaan, pewarisan, sejarah, budaya, kepemimpinan, dan kekerabatan. Hal ini telah lama dipraktekkan oleh pendahulu kita dalam menghadapi berbagai persoalan dalam masyarakat. Sistem ini telah lama terbangun dan cukup teruji dalam menentukan bentuk keputusan, kesepakatan damai, penerimaan dan perbaikan masyarakat ke depan.

Kerap kali berbagai sengketa sulit diterima oleh pihak-pihak yang bertikai melalui proses formal dengan menggunakan lembaga hukum yang cukup menyita waktu, panjang dan melelahkan. Masyarakat kemudian mencari alternatif lain dengan mengupayakan penyelesaian melalui jalur non-formal yang dianggap lebih mengutamakan perdamaian daripada berkuat dengan bukti dan fakta hukum yang terkadang sulit diterima.

Selain model-model penyelesaian konflik yang sudah ada secara teoretis di atas, harus diingat juga bahwa masyarakat Rokan Hilir memiliki keragaman budaya. Setiap budaya memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam menyikapi permasalahan hidup yang dihadapi, termasuk di dalamnya kearifan dalam menyelesaikan konflik. Kearifan-kearifan seperti inilah sebagai kearifan lokal (*local wisdom*). Model penyelesaian konflik melalui kearifan lokal menjadi salah satu cara yang sangat efektif ditempuh oleh masyarakat untuk menemukan bentuk dan jenis masalah dengan mempertimbangkan aspek penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Mengurangi resiko dan biaya sosial yang tinggi, karena masing-masing pihak berusaha membangun dialog dan keterbukaan terhadap pentingnya kesepakatan damai daripada proses pembuktian terhadap fakta hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, banyak pihak menaruh perhatian terhadap proses penyelesaian sengketa berbasis pada nilai-nilai dan kearifan lokal. Dalam memahami konteks nilai dan budaya lokal dalam merumuskan alternatif strategi dalam penyelesaian sengketa, masyarakat melibatkan diri untuk mencari informasi yang berhubungan dengan tingkat kebutuhan mereka melalui berbagai informasi ditengah keterbukan akses baik melalui informasi dari aparat pedesaan maupun melalui berbagai media massa baik cetak maupun elektronik. Kegiatan inilah yang dilakukan dan yang akan membantu masyarakat dan para pihak yang terlibat langsung dalam sengketa dalam merumuskan masa depan dan pilihan penyelesaian sengketa dengan mengacu pada proses dan mekanisme adat, budaya dan nilai-nilai yang bersifat lokal.

Biasanya model penyelesaian konflik dengan mempersatukan (*Integrating*) Individu yang memilih model ini perlu melakukan tukar menukar informasi. Pada pendekatan ini diperlukan adanya keinginan untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Khusus mengenai masalah yang berhubungan dengan kebanyakan masyarakat mendapatkan informasi pekerjaan. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa mereka sering dan sudah mampu mencari informasi sendiri yang berhubungan dengan pekerjaan baik di pedesaan maupun melalui media massa yaitu sebesar 70,73 % menjawab sering, sedangkan yang menjawab jarang atau pernah mencari informasi sendiri sebesar 14,63 %. Sedangkan tanggapan tidak pernah mencari informasi sendiri justru lebih kecil yaitu sebesar 12,80 %.

Tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan salah satu faktor munculnya berbagai konflik antar masyarakat. Di sinilah peran pemerintah untuk harus memikirkan tentang rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Juga, perlu disadari dalam upaya mengatasi konflik dan pemberdayaan masyarakat haruslah menggunakan pendekatan komunikasi yang lebih sesuai

dengan kondisi masyarakat setempat, misalnya menggunakan bahasa, teknik dan media komunikasi yang dapat diakses oleh kebanyakan masyarakat yang berpendidikan relatif rendah tersebut.

Pemberdayaan masyarakat yang efektif membuat masyarakat menjadi berdaya, yaitu masyarakat menjadi lebih dinamis, lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya, lebih mampu akses teknologi tepat guna, luas wawasan, kosmopolit, dan empati terhadap pihak luar. Perubahan dari sistem sosial tradisional tersebut terjadi melalui proses penyadaran dan partisipatif. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu memperhatikan peluang, ancaman, permasalahan dan potensi sumberdaya lokal yang ada.

Kini sudah cukup dikenal istilah pertanian berkelanjutan (*sustainable development*) yang memadukan tiga tujuan yang meliputi : (1) pengamanan lingkungan, (2) pertanian yang secara ekonomi menguntungkan, dan (3) terwujudnya kesejahteraan sosial (Gold, 1999). Pertanian berkelanjutan merupakan suatu pendekatan sistem yang memahami keberlanjutan secara mutlak, yang memahami sudut pandang ekosistem lokal, masyarakat yang terkait dengan sistem pertanian, baik lokal maupun global, sehingga dapat menjadi instrumen menggali interkoneksi antar pertanian dan aspek lain dari lingkungannya dalam jangka panjang. Dalam proses pemberdayaan seperti ini dilihat dari perspektif pemerintah maka tujuannya adalah tidak hanya meningkatkan produksi pertanian khususnya pangan dan perkebunan, merangsang pertumbuhan ekonomi, namun juga harus dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga petani dan masyarakat desa (pelaku utama, pelaku usaha) dan rakyat, serta mengusahakan pertanian berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut sering dalam prakteknya dihadapkan pada masalah-masalah potensi konflik berikut (Sumardjo, 2009):

1. Peningkatan produksi versus penetapan harga produk
2. Peningkatan dan pencapaian target produksi versus cara tidak partisipatif dan berorientasi
3. Target Intervensi top down versus upaya pemberdayaan dan pengembangan kemandirian petani
4. Penyuluhan atau pemberdayaan sebagai instrumen pemerintah (mengejar target produksi) versus instrumen rakyat (peningkatan kesejahteraan)
5. Mengutamakan kepentingan pemerintah atau perusahaan, versus mengutamakan kepentingan rakyat

Seyogyanya ditempuh solusi berupa proses pemberdayaan dengan pendekatan dialog, dengan komunikasi konvergen dan pengembangan pola-pola kemitraan sinergis antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat itu sendiri atau yang sering disebut dengan pola kemitraan. Terbukti antara oknum masyarakat, maupun oknum pemerintahan melakukan kerjasama yang baik untuk membangun daerah pertanian mereka. Sebagian besar menjawab tidak pernah melakukan penjualan tanah tanpa prosedur yang telah ditetapkan, dan yang menjawab sebesar 67, 07 %. dan yang menjawab sering sebesar 11, 59%, sedangkan yang menjawab jarang sebesar 18, 90%. Ini membuktikan ada konvergensi antara pihak-pihak terkait dengan pola kemitraan.

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama sinergis antar berbagai pihak terkait yang sifatnya saling mendukung, saling memperkuat dan saling menghidupi. Terkait dengan pengelolaan potensi konflik kemitraan perlu terjadi antara pihak-pihak terkait serta peranan masing-masing harus jelas:

1. Kemitraan Pemerintah-Dunia Usaha

Peran yang dimainkan pemerintah Peran pemerintah : *mandating, fasilitating, partnering, endorsing* untuk mengembangkan sinergi kegiatan bersama pemerintah dengan pihak terkait.

2. Kemitraan Masyarakat-Dunia Usaha

Harapan masyarakat terhadap dunia usaha adalah peningkatan pendapatan, kontribusi perusahaan, dan tumbuhnya kebanggaan atas keberadaan perusaah tersebut di daerah itu.

2. Keterlibatan masyarakat dalam program CSR, yang perlu dikembangkan adalah bagaimana dapat ditingkatkan manfaat komunitas pada perusahaan dan manfaat perusahaan pada komunitas.

Perlu diupayakan bagaimana meningkatkan peran komunitas atau masyarakat petani dalam berkontribusi terhadap reputasi dan citra yang lebih baik bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, melegitimasi untuk perusahaan beroperasi secara sosial, menyediakan untuk pemanfaatan tenaga kerja lokal. Di samping itu peran masyarakat juga dapat berkembang kearah terwujudnya keamanan yang lebih besar bagi operasinal perusahaan dan terpeliharannya pemanfaatan infrastruktur lingkungan sosial ekonomi lebih baik.

Dilihat dari perspektif terhadap pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan potensi konflik dan resolusi konflik perlu dilihat secara proporsional dan secara kontekstual. Tindakan yang dipilih dalam pemberdayaan masyarakat bisa mencakup pengembangan kapasitas individu petani, kelompok atau organisasi masyarakat, masyarakat dan pengembangan koordinasi lintas instansi sektoral maupun ko\ordinasi horisontal dan vertikal dalam instansi Kepemerintahan.

Konflik lokal juga perlu dihindari agar pembangunan masyarakat dapat berjalan dengan baik di daerah. Pendekatan-pendekatan lain yang harus dilakukan untuk untuk mencegah agar tidak terjadi konflik lokal di Rokan Hilir dapat dirangkum sebagai berikut;

1. **Pendekatan modal sosial (*sosial capital*).** Di masa-masa mendatang pelayanan sosial harus berupaya menggali modal sosial yang ada dalam masyarakat petani kelapa sawit. Banyak permasalahan-permasalahan sosial yang belum terjangkau pelayanan pemerintah daerah Kabupaten Rokan hilir karena kemampuan modal ekonomi pemerintah daerah yang sangat terbatas. Di sisi lain, permasalahan sosial petani kelapa sawit cenderung semakin bertambah dan berkembang serta semakin kompleks. Untuk itu, pengembangan pelayanan sosial yang mengandalkan modal sosial melalui kemampuan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan permasalahan sosial tersebut.

2. **Pendekatan Pemerataan Pembangunan Daerah**

Masalah kebudayaan sangat penting untuk diperhatikan. Karena budaya telah mengalir dalam hidup masyarakat. Secara antropologis manusia telah dibelenggu oleh adat istiadatnya. Bahkan, kadang-kadang hal tersebut menjadi penghambat proses pembangunan. Sering terjadi konflik antara kebudayaan dan modernisasi. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah agama. Agama dan kebudayaan sering kali telah lebur dalam kehidupan masyarakat. Sehingga sangat membedakan mana yang agama dan mana yang kebudayaan. Karena eratnya hubungan pembangunan politik dan kebudayaan, maka berkembanglah aliran pemikiran kebudayaan politik. Pemerataan pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir mutlak diperlukan untuk tidak terjadinya konflik bagi masyarakat petani kelapa sawit.

3. **Pendekatan Agama**

Pendekatan keagamaan dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, melalui nilai-nilai agama diharapkan masyarakat akan tidak mudah untuk terpancing melakukan konflik.

4. Pendekatan Budaya

Pendekatan budaya dilakukan oleh tokoh adat di masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai adat dan budaya yang dianut di masyarakat sehingga akan meningkatkan persatuan dan mencegah terjadinya konflik horizontal. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Kekuatan yang mengikatnya tergantung kepada masyarakat atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut.

Tatanan kehidupan orang Batak selalu bergerak dalam harmoni keseimbangan. Harmoni ini tersimpul dalam falsafah Batak: “*Manat mardongan tubu/sabutuha* (bersikap hati-hati kepada kerabat semarga); *elek marboru* (berlaku sayang kepada penerima wanita; dan *somba marhula-hula* (menaruh hormat kepada marga pemberi wanita) yang dikenal “DALIHAN NA TOLU” atau Tungku Nan Tiga”. Oleh karena itu sekali pun orang Batak telah mengadaptasikan nilai-nilai baru, mengadaptasikan diri dengan lingkungan budaya baru, namun sekaligus mereka tetap tradisional, mempertahankan ikatan-ikatan kekeluargaan. Pendekatan tersebut lebih berhasil daripada pendekatan hukum karena keberadaannya telah lahir jauh sebelum ada hukum atau peraturan-peraturan.

5. Pendekatan Multi Kultur

Konsep multi kultur perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan masyarakat dapat memahami berbagai karakteristik budaya lain, sehingga kehadiran budaya lain tidak dipandang secara curiga dan sinis terhadap keberadaan simbol-simbol komunitas lain.

6. Pendekatan Pluralisme

Melalui konsep pluralisme masyarakat lebih bersikap terbuka terhadap kehadiran budaya dan komunitas lain. Masyarakat memandang keberagaman sebagai suatu yang indah dan penuh persaingan secara positif untuk memajukan komunitasnya masing-masing. Terjadinya

pertukaran nilai dan budaya adalah bentuk positif adanya pluralisme di tengah masyarakat sehingga terjadi bentuk-bentuk kemajuan.

7. Pendekatan Perkawinan

Melalui perkawinan antar etnik diharapkan akan terjadi pertukaran budaya dan peningkatan hubungan persaudaraan antar etnik sehingga dapat mencegah terjadinya konflik. Melalui perkawinan antar etnis, masyarakat dapat melakukan acara-acara seremonial yang bersifat nasional dan bukan kedaerahan, atau juga melaksanakan kedua adat yang berlaku sesuai persetujuan kedua belah pihak

8. Pendekatan Interaksi Lintas Budaya

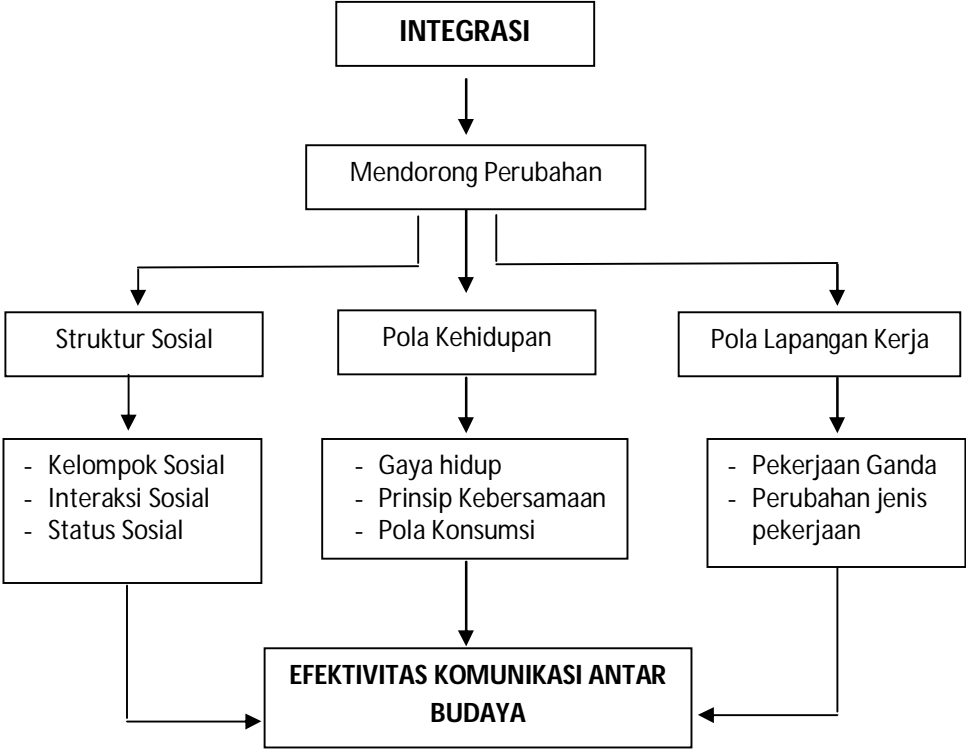
Adanya interaksi dalam bentuk pertemanan dan hubungan bisnis juga dapat meningkatkan terjadinya kesepahaman dan hubungan silaturahmi antar etnis sehingga dapat mencegah terjadinya konflik. Hidup berdampingan dengan tetangga yang bukan satu daerah asal, berbeda etnis, agama maupun kebiasaan-kebiasaan menjadi perekat dalam keharmonisan bermasyarakat apabila masing-masing etnis saling menghormati

9. Pendekatan Akulturasi

Proses akulturasi adalah adanya bentuk perilaku mengembangkan budaya namun menghormati keberadaan budaya lain. Menghargai kebudayaan orang lain merupakan kewajiban yang harus dilakukan tanpa mengorbankan kebudayaan asal individu

Dari berbagai uraian di atas dapat dikemukakan bahwa pola komunikasi dan integrasi yang dilakukan petani kelapa sawit untuk mengatasi agar tidak terjadi konflik horizontal di Rokan Hilir adalah seperti gambar berikut;

Gambar 2
Komunikasi Antar Budaya



BAB VIII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Proses proletarisasi di pedesaan Rokan Hilir terus berlangsung. Masyarakat desa yang mayoritas petani, yang tadinya memiliki tanah mulai kehilangan sumber penghasilannya karena tanah tak lagi mereka kuasai. Terjadinya proletarisasi masyarakat pedesaan, maka konflik agraria bakal makin terus terjadi dan mendatangkan korban. Pemerintah daerah kadangkala berpikir jangka pendek dengan lebih memilih memberikan izin kepada perusahaan daripada berpihak kepada masyarakat tani. Ketidakberpihakan itu menimbulkan konflik lahan. Maka, perlu adanya memberikan hak-hak tenurial masyarakat adat dan harus ada kepastian, keadilan dan kedaulatan tenurial pada masyarakat tani serta merealisasikan pembaruan agraria.
2. Budaya dan komunikasi tidak dapat dipisahkan oleh karena budaya tidak hanya menentukan siapa, tentang apa, dan bagaimana komunikasi berlangsung, tetapi budaya turut menentukan bagaimana orang menyandi pesan, makna yang ia miliki untuk pesan, dan kondisi-kondisinya untuk mengirim, memperhatikan dan menafsirkan pesan.
3. Komunikasi antar budaya pada petani kelapa sawit di Rokan Hilir mengutamakan akulturasi budaya apabila kelompok-kelompok individu petani kelapa sawit memiliki kebudayaan yang berbeda saling berhubungan secara langsung dengan intensif. Percampuran kebudayaan atau asimilasi terjadi kalau dua kebudayaan kehilangan identitas masing-masing dan menjadi satu kebudayaan. Jelaslah bahwa melalui akulturasi individu yang sudah

mempunyai kebudayaan berangsur-angsur dilepaskan dan kemudian menerima kebudayaan baru yaitu kebudayaan Melayu Riau

4. Konflik horizontal sering terjadi di Kabupaten Rokan Hilir juga dipengaruhi oleh; (a). Perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas; (b) Prasangka/persepsi; (c) Perbedaan nilai; (d) Perbedaan kepentingan; (e) Kurang berkomunikasi; (f) Kepemimpinan yang kurang efektif; (g) Ketidakcocokan; (h) Kesenjangan dan; (i) ketidakpuasan
5. Menghindarkan konflik horizontal bagi petani kelapa sawit pihak perusahaan perkebunan perlu memperhatikan; (a) Perusahaan harus hadir dengan pemahaman kondisi, kultur dan karakteristik masyarakat local; (b) Memberikan konvensasi terhadap segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan; (c) Melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat sosial sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat; (d) Melibatkan dan mendidik pengusaha lokal dalam hal pelaksanaan proyek-proyek perusahaan; dan (e) Merekrut tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan yang ada. Tenaga kerja sosial tidak hanya menjadi penonton di daerahnya tetapi harus diberdayakan dan menjadi asset penting dalam mendukung pembangunan pertanian kelapa sawit
6. Pendekatan yang perlu dilakukan kepada petani kelapa sawit antara lain; (a) Pendekatan modal social (*social capita*); (b) Pendekatan Pemerataan Pembangunan Daerah; (c) Pendekatan Agama; (d) Pendekatan Budaya; (e) Pendekatan Multi Kultur; (f) Pendekatan Pluralisme; (g) Pendekatan Perkawinan; (h) Pendekatan Interaksi Lintas Budaya; dan (i) pendekatan Akulturasi

B. SARAN-SARAN

1. Perusahaan harus hadir dengan pemahaman kondisi, kultur dan karakteristik masyarakat lokal; memberikan kompensasi terhadap segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan; melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat lokal sehingga terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat; melibatkan dan mendidik pengusaha lokal dalam hal pelaksanaan proyek-proyek perusahaan; merekrut tenaga kerja lokal sesuai dengan kemampuan yang ada.
2. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat memberi kemudahan kepada petani kelapa sawit dalam memenuhi kewajibannya untuk memiliki surat tanah yang sah dalam bentuk Sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga petani kelapa sawit diikutsertakan dalam Program Prona.
3. Komunikasi antar budaya dalam mengurangi konflik horizontal sangat diperlukan. Untuk itu, pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu melakukan pendataan terhadap etnis-etnis sekaligus dapat menentukan metode yang tepat dan efektif dalam menanggulangi permasalahan petani kelapa sawit yang multikultur.
4. Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir perlu meningkatkan pelayanan terhadap petani kelapa sawit, dan berpihak kepada rakyat apabila ada permasalahan antara petani kelapa sawit dengan pihak perusahaan perkebunan

DAFTAR PUSTAKA

- Alo Liliweri, 2009, *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LkiS, Yogyakarta
- Antar Venus, 2007, *Komunikasi Yang Memerdekakan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Jurnal ISKI Nomor 1 Agustus 2007, Bandung
- Anwar Arifin, 2008, *Opini Publik*, Pustaka Indonesia, Jakarta
- Bambang Rudito, 2007, *Audit Sosial*, Rekayasa Sains, Bandung
- Bangun, Rindu Kasih, 2009, *Pemberdayaan Masyarakat Tempatan Dalam Pelestarian Hutan Lindung Bukit Suligi*, Jurnal Teroka, Nomor 3 Agustus 2009, Balitbang Riau
- Batakusuma Deddy Supriady, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Burhan Bungin, 2007, *Sosiologi Komunikasi, Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Forum Intelektual Indonesia, 2007, *Jati Diri Bangsa Dalam Ancaman Globalisasi*, Airlangga University Press, Surabaya
- Ida Fariastuti, *Komunikasi Antarbudaya*, Wacana Jurnal ilmiah Ilmu Komunikasi, Volume VIII No.28 Desember 2009, Fikom Universitas Moestopo, Jakarta
- Idi Subandy Ibrahim, 2007, *Kecerdasan Komunikasi Seni Berkomunikasi Kepada Publik*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung
- Kuncoro, Mudrajat, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi*, Perencanaan Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta
- Lian Gogali, 2009, *Konflik Poso, Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan*, Penerbit Galangpress, Yogyakarta
- N.N., 2006, *Strategi Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I) Melalui Pendekatan Komunikasi dan Informasi di Provinsi Riau*, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau
- Ramli, *Kinerja Aparatur dan Pengembangan Wilayah*, 2007, USU Press, Medan
- Sabian Utsman, 2007, *Anatomi Konflik & Solidaritas Masyarakat Nelayan*, Sebuah Penelitian Sosiologis, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sugiarto, 2003, *Teknik Sampling*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

- Tinambunan, W.E., 2002, *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antar Etnik Pada Warga Kota Pekanbaru*, Lemlit, Universitas Riau, Pekanbaru
- _____, 2004, *Prasangka Sosial dan Efektivitas Komunikasi Antaretnik Tionghoa, Batak, Melayu, Jawa dan Minangkabau di Kabupaten Bengkalis*, Pemda Bengkalis
- _____, 2006, *Strategi Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur Melalui Model Komunikasi dan Informasi*, Balitbang Riau
- _____, 2008, *Dampak Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Sosial Budaya Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis*, Lemlit Universitas Riau, Pekanbaru
- _____, 2010, *Pemberdayaan Komunitas Suku Sakai Dalam Mempertahankan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Bengkalis*, Lemlit Universitas Riau, Pekanbaru
- _____, 2011, *Dampak Migrasi Penduduk Terhadap Perkembangan Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Sakai Di Kabupaten Bengkalis*, Lembaga Penelitian, Universitas Riau
- _____, 2011, *Metode Penelitian Komunikasi*, Jilid I, Sinar Kelasens, Pekanbaru
- _____, 2011, *Metode Penelitian Komunikasi*, Jilid II, Sinar Kelasens, Pekanbaru
- _____, 2012, *Opini Publik Terhadap Informasi Program Pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Ketertinggalan Infrastruktur (K2I) di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Studi Kasus: Masyarakat Batak*, Lembaga Penelitian, Universitas Riau